



**KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK DALAM MENCEGAH  
KEMERDEKAAN KURDISTAN IRAK PASCA REFERENDUM TAHUN  
2017**

*(IRAQI GOVERNMENT POLICY TO PREVENT IRAQI KURDISTAN'S  
INDEPENDENCE AFTER THE 2017 REFERENDUM)*

**SKRIPSI**

Oleh

**LUTHFIATUL UDHMA**

**NIM 140910101046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK DALAM MENCEGAH  
KEMERDEKAAN KURDISTAN IRAK PASCA REFERENDUM TAHUN  
2017**

*(IRAQI GOVERNMENT POLICY TO PREVENT IRAQI KURDISTAN'S  
INDEPENDENCE AFTER THE 2017 REFERENDUM)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**LUTHFIATUL UDHMA**

**NIM 140910101046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Kepada hambaNya, atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, serta menjadi sandaran utama dalam hidup ini.
2. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga, atas dukungan penuh dan perhatian yang tulus, serta doa-doa yang tidak pernah terputus dalam mengiringi penulisan karya tulis ini.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dikembangkan kedepannya.

**MOTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(terjemahan Q.S. Al Insyirah ayat 5)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al- 'Alim: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiatul Udhma

NIM : 140910101046

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK DALAM MENCEGAH KEMERDEKAAN KURDISTAN IRAK PASCA REFERENDUM TAHUN 2017” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,

Luthfiatul Udhma

NIM 140910101046

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK DALAM MENCEGAH  
KEMERDEKAAN KURDISTAN IRAK PASCA REFERENDUM TAHUN  
2017**

Oleh

**LUTHFIATUL UDHMA**

**NIM 140910101046**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum**

**Dosen Pembimbing Anggota: Drs. Supriyadi, M.Si**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Irak Dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 23 Juli 2018

waktu : 09.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Fuat Albayumi, S.IP, MA  
NIP. 197404242005011002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum  
NIP. 195904231987021001

Drs. Supriyadi, M. Si  
NIP. 195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP.195908311989021001

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A  
NIP 197611122003121002

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kebijakan Pemerintah Irak Dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017;** Luthfiatul Udhma; 140910101046; 2018; 86 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Kurdistan Irak melaksanakan referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017. Hasil dari Referendum Kurdistan Irak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 sebanyak 92,73% memilih untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak. Referendum ini sangat ditentang oleh pemerintah Irak serta negara-negara tetangga Irak dan organisasi internasional. Mulai dari Kurdistan Irak mendapatkan hak otonomi pada tahun 2004 hingga dilaksanakannya referendum kemerdekaan pada tahun 2017, Pemerintah Irak selalu memberikan keleluasaan dan kuasa yang besar kepada Kurdistan Irak. Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak dalam menghadapi Etnis Kurdi dan Wilayah Regional Kurdistan (KRG) bukanlah kebijakan yang bersifat rayuan agar KRG tidak memisahkan diri dari Irak, namun lebih kepada tekanan dan batasan.

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data-data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, laporan, skripsi, tesis, dan berita-berita internasional yang menyoroti masalah yang terkait dengan referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kurdistan Irak pada tahun 2017. Data yang diperoleh akan diteliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan konsep kebijakan dan *Carrot and Stick Approach*.

Hasil penelitian yang didapat dengan menganalisa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Irak terhadap Kurdistan Irak menunjukkan bahwa pendekatan *stick* dengan tiga tekanan, yaitu tekanan ekonomi, politik, dan psikologis berhasil diterapkan. Serta adanya pendekatan *carrot* setelah Kurdistan Irak memutuskan untuk membatalkan referendum juga telah dilaksanakan dan Kurdistan Irak tetap berada dalam kedaulatan Irak. Hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Irak adalah pencabutan embargo penerbangan internasional, jaminan



gaji pegawai negeri yang ada di KRG, serta jaminan anggaran yang masuk untuk KRG sebanyak 17% dari total anggaran Pemerintah Irak akan disalurkan sebagaimana mestinya dan tanpa ada hambatan.



## PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh hambaNya yang dirahmati. Atas izin, karunia dan limpahan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Irak Dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017”** ini dalam rangka mencapai gelar pendidikan Strata Satu (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Atas bantuan yang tulus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada: (dari pak dekan, kajur, pembimbing)

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan bersama Drs. Djoko Susilo, M.Si, yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
4. Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Drs. Supriyadi, M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasan beliau berdua selama ini untuk meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas semua ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh guru dari pendidikan RA, MI, MTS, dan MA atas kontribusinya memberikan ilmu kepada penulis.

7. Abah Muhammad dan Ibu Siti Kholisoh, kedua orang tua hebat penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis baik itu spiritual maupun materiil, do'a tanpa putus, dan selalu menjadi kekuatan bagi penulis di setiap langkah menyelesaikan skripsi.
8. Anggota keluarga penulis; M. Abid Fahmi, Abdullah Labiq Haqqul Fawaz, Thoriq Mustofa Ahmad, Zahid Mukarrim Syauqillah, dan seluruh anggota keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas semangat, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat teman seperjuangan penulis tercinta; Kamiliya Atikah, Ladia Aisah, Nunik Zulfiyah, Dwi Ananda Violita, Yurike Salzabella, dan Ayuning Dwi Permata Sari yang telah meluangkan waktu, tenaga, keikhlasan hati, dan pikiran untuk saling menguatkan, merajut mimpi dan kenangan bersama, serta menjadi penghibur bagi penulis selama menempuh pendidikan semasa perkuliahan dan sepanjang proses pengerjaan skripsi. *Together we made a great team, girls!*
10. *Special request from Al-Maunah Squad thank you so much for always in home to accompany me, they are* Hanifah, Nova, Aci, Zura, Nida, Ega, Shobi, Kenny, Mbak Hayyu, Mbak Ratna *etc.*
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNEJ khususnya angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi, atas semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat erat.
12. Seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyempurnakan skripsi ini dan menjadikanya lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi kemajuan akademik kedepannya.

Jember, 23 Juli 2018

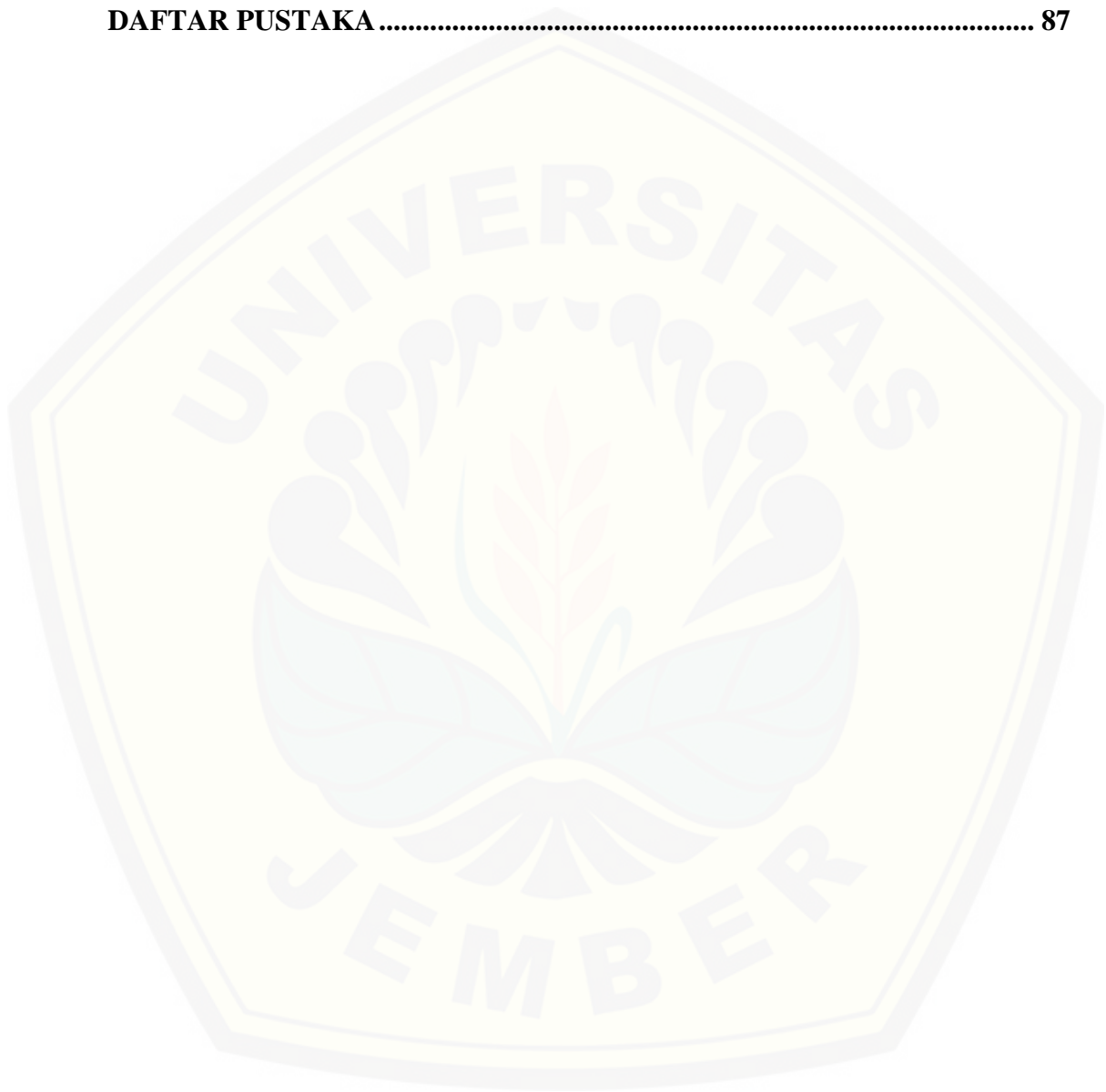
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan .....	8
1.3.1 Batasan Materi.....	8
1.3.2 Batasan Waktu.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	9
1.5.1 Konsep Kebijakan .....	10
1.5.2 <i>Carrot and Stick Approach</i> .....	11
1.6 Argumen Utama.....	13
1.7 Metode Penelitian .....	13
1.7.1 Metode Pengumpulan Data .....	14
1.7.2 Metode Analisa Data .....	14
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB 2. PROFIL NEGARA IRAK DAN ETNIS KURDI</b> .....	<b>17</b>
2.1 Profil Negara Irak .....	17
2.1.1 Sejarah Singkat Irak .....	20

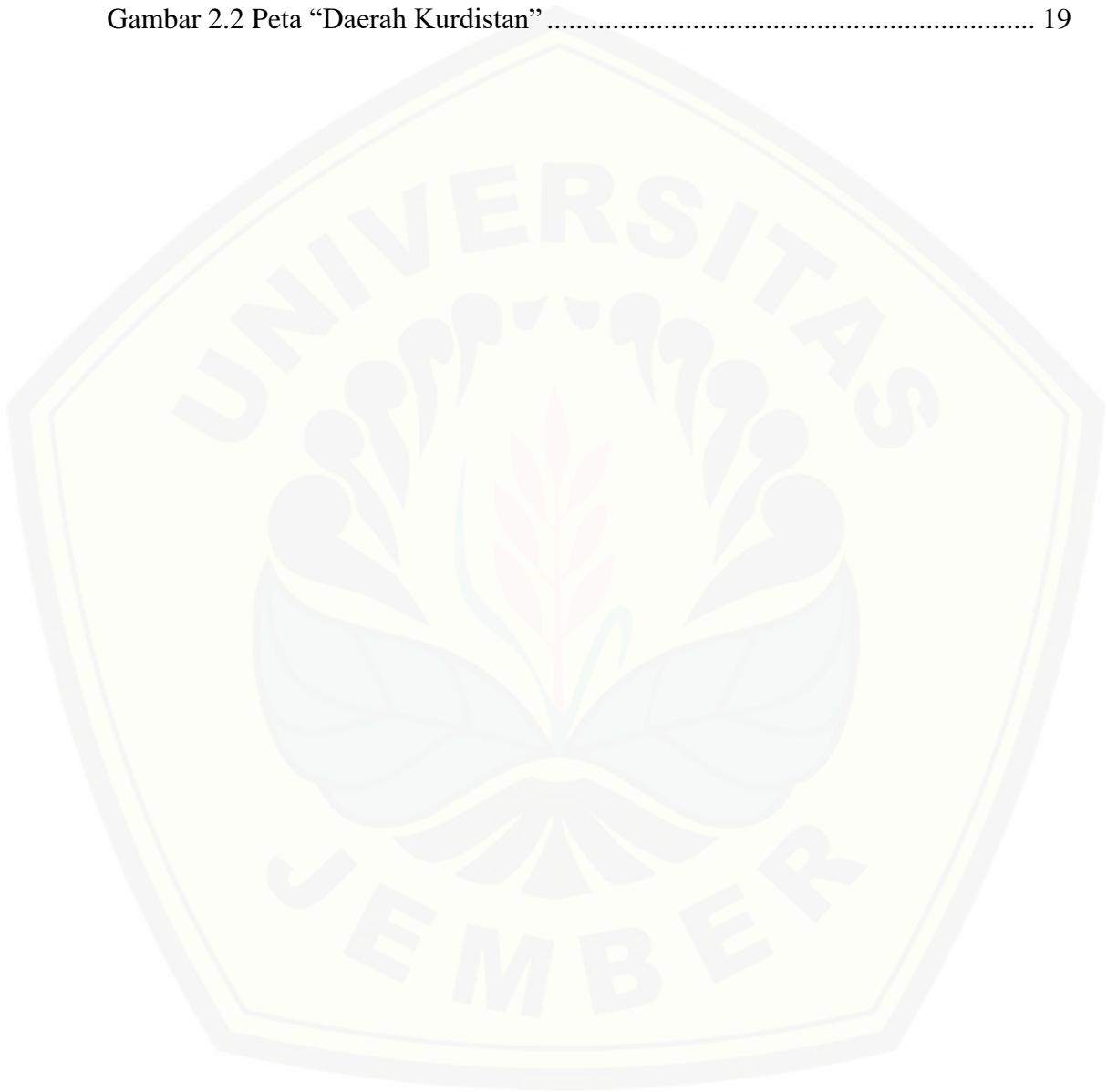
2.1.2	Sistem Pemerintahan dan Pemilu di Irak .....	28
2.1.3	Militer Irak, Peshmerga, dan ISIS .....	30
2.2	Profil Etnis Kurdi .....	31
2.2.1	Sejarah Singkat “Kurdistan” .....	33
2.2.2	Etnis Kurdi di Turki .....	34
2.2.3	Etnis Kurdi di Iran .....	36
2.2.4	Etnis Kurdi di Suriah .....	39
2.2.5	Etnis Kurdi di Irak .....	41
2.3	Keterikatan Irak dan Etnis Kurdi .....	45
2.3.1	Etnis Minoritas vs Etnis Mayoritas .....	46
2.3.2	Sengketa Wilayah Kirkuk .....	46
2.3.3	Pemerintah Irak vs KRG .....	47
2.3.4	Sunni vs Syiah .....	48
2.3.5	Pasukan militer Irak vs Peshmerga .....	49
<b>BAB 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK TERHADAP ETNIS KURDI DAN KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG) .....</b>		<b>50</b>
3.1	Kebijakan Pemerintah Saddam Hussein .....	50
3.2	Kebijakan Pemerintah Irak Pasca Invasi Amerika Serikat .....	53
3.2.1	TAL (Transitional Administrative Law) .....	55
3.3	Kebijakan Pasca Pemilu 2010 .....	56
3.3.1	Kebijakan Sengketa Minyak di Kirkuk .....	58
3.4	Kebijakan Pemerintah Pasca Pemilu 2014 .....	61
3.5	Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Tahun 2017 .....	64
<b>BAB 4. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK UNTUK MENCEGAH KEMERDEKAAN KURDISTAN IRAK PASCA REFERENDUM TAHUN 2017 .....</b>		<b>67</b>
4.1	Pendekatan <i>Stick</i> .....	69
4.1.1	Tekanan Ekonomi .....	69
4.1.2	Tekanan Politik .....	75
4.1.3	Tekanan Psikologis .....	78
4.2	Pendekatan <i>Carrot</i> .....	81

4.2.1 Pencabutan Embargo Penerbangan Internasional .....	82
4.2.2 Pemberian Upah untuk Pegawai Negeri di KRG .....	83
4.2.3 Pemberian Jatah Anggaran Dana Kepada KRG.....	84
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Irak.....	17
Gambar 2.2 Peta “Daerah Kurdistan” .....	19



**DAFTAR SINGKATAN**



ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KNAS	: <i>The Kurdistan National Assembly of Syria</i>
KRG	: <i>Kurdistan Regional Government</i>
MEA	: <i>Middle East Airlines</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSK	: <i>Parsitans of Southern Kurdistan</i>
PKK	: <i>Partiya Karkaran Kurdistan</i>
PUK	: <i>Patriotic Union of Kurdistan</i>
RCC	: <i>the Revolutionary Command Council</i>
SOMO	: <i>State Organization for Marketing of Oil</i>
TAL	: <i>Transtitional Administrative Law</i>



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Irak merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Asia Barat dengan luas wilayah 437.072 kilometer persegi. Irak berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah lain, yaitu Turki di sebelah utara, Iran di sebelah timur, Kuwait di sebelah tenggara, Arab Saudi di sebelah selatan, Yordania di sebelah barat daya dan Suriah di sebelah Barat. Baghdad merupakan ibukota negara Irak dan merupakan kota terbesar di negara tersebut (KBRI, 2017).

Jumlah penduduk Irak mencapai tiga puluh tujuh juta jiwa dengan berbagai etnis, etnis mayoritas yang menduduki Irak adalah Etnis Arab (BBC, 2017a). Sedangkan beberapa etnis minoritas yang menduduki Irak adalah Kurdi, Turkoman, Assyria, Mandeian, Shabaki, Yazidi dan lainnya (KBRI, 2017). Jumlah etnis Kurdi di Irak mencapai 3.757.058 jiwa pada tahun 2002 (KRG, 2017c). Jumlah ini setara dengan 15-20% dari total jumlah penduduk Irak (Muhaimin, 2017a). Mereka menduduki daerah utara Irak yang meliputi daerah Sulaimaniyah, Kirkuk, Dahuk, dan Erbil. Ketiga daerah tersebut, kecuali Kirkuk yang masih menjadi daerah sengketa, adalah provinsi yang dijadikan bagian dari Daerah Otonomi Kurdistan (*Kurdistan Regional Government/KRG*). Luas wilayah Daerah Regional Kurdistan (KRG) adalah 40.643 kilometer persegi (KRG, 2017c). Daerah Kirkuk merupakan daerah kaya minyak yang ada di Irak dan menjadi sengketa dikarenakan KRG secara konstitusi tidak menguasai daerah tersebut, namun sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kurdi (Mizan, 2015:27). Sehingga walau tidak termasuk KRG Kirkuk lebih condong mengikuti KRG daripada Pemerintah Irak.

Agama mayoritas di Irak adalah agama Islam, di mana 97% penduduk Irak memeluk agama Islam dan 3% beragama Kristen atau lainnya. Adapun agama Islam yang dianut oleh penduduk Irak dibagi menjadi dua golongan yaitu Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Irak memeluk Islam Syiah yaitu sebanyak 60% (KBRI, 2017).

Hal ini berbanding terbalik dengan agama mayoritas yang dianut oleh KRG yakni agama Islam Sunni yang mengikuti ajaran Syafi'i. Selain agama Islam, adapun agama lain yang dianut oleh sebagian kecil penduduk Kurdistan. Agama minoritas tersebut adalah Kristen, yang meliputi Katolik Suriah, Ortodoks Suriah, Gereja Asiria Timur, Armenia, dan Katolik Chaldean. Selain itu ada juga agama Yazidisme, dan menganut Iman Kaka'I (KRG, 2017b).

Daerah Kurdistan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Irak dikarenakan etnis Kurdi tidak hanya menduduki Irak, tetapi juga tiga negara tetangganya yaitu Iran, Turki, dan Suriah. Upaya etnis Kurdi dalam memperoleh otonomi hingga melakukan referendum kemerdekaan tahun 2017 menjadi perhatian khusus pemerintah Irak. Adapun beberapa kebijakan Pemerintah Irak terkait etnis kurdi dan KRG adalah sebagai berikut.

Pasca Perang Dunia I kerajaan Ottoman mengalami keruntuhan. Irak menjadi salah satu negara yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris setelah Perang Dunia I. Pada tahun 1916 dalam Perjanjian Sykes-Picot Inggris menjanjikan kepada etnis Kurdi untuk memberikan hak otonomi (Hapsari, 2012).

Pada tahun 1920 kolonial Inggris membuat perjanjian tentang tanah kurdi yang biasa disebut dengan perjanjian Sevres<sup>2</sup>, menyatakan bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan pada Kurdistan (Sahide, 2013:141). Tetapi perjanjian tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan daerah Kurdistan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga Inggris tidak pernah merealisasikan perjanjian tersebut.

---

<sup>2</sup> Perjanjian Sevres merupakan Perjanjian Perdamaian Inggris dengan Turki yang ditandatangani di kota Sevres, Perancis. Prjanjian ini mencakup tentang kemerdekaan Kurdistan yang dicantumkan dalam Bagian III pasal 62, 63, 64 (*"Treaty of Peace with Turkey Lausanne,"* 1923).

Karena tidak ingin merealisasikan janjinya dalam perjanjian Sevres, Inggris memperbarui perjanjian tersebut melalui perjanjian Lausanne pada tahun 1923 yang mana tidak menyinggung sedikitpun tentang kemerdekaan etnis Kurdi. Dalam Perjanjian Lausanne lebih menekankan pada pembagian wilayah kurdi yang terbagi atas empat negara yaitu Irak, Iran, Turki dan Suriah (Hapsari, 2012).

Semangat kemerdekaan Kurdistan Irak dipelopori oleh Sheikh Mahmoud Barzani yang merupakan Gubernur Sulaimaniyah dan menjabat pada tahun 1918 pada masa kolonial Inggris. Pada awalnya, kolonial Inggris mengangkat Barzani untuk memenangkan hati etnis Kurdi. Namun, pada kenyataannya setelah penetapan Mahmoud Barzani sebagai gubernur Sulaimaniyah, Barzani memerintahkan penangkapan seluruh pejabat Inggris. Hal inilah yang menyebabkan setahun setelah pelantikannya sebagai gubernur, Barzani diasingkan ke India. Karena takut akan kemarahan etnis Kurdi, pada tahun 1920 Mahmoud Barzani dipulangkan dari pengasingan dan diangkat menjadi “Gubernur Kurdistan Selatan” oleh Pemerintah koloni Inggris. (KRG, 2017a; Mizan, 2015:47-48).

Semangat Mahmoud Barzani dilanjutkan oleh Ahmad Barzani dan Mustafa Barzani. Tetapi kedua bersaudara ini lebih pada memperjuangkan hak otonomi Kurdistan Irak dari Kerajaan Irak bentukan Inggris (masih dalam kendali kolonial Inggris). Pada tahun 1961 Mustafa Barzani meminta otonomi Kurdi terhadap Pemerintah Irak, namun permintaan tersebut ditolak. Sehingga pada tanggal 11 September 1961, Mustafa Barzani mengeluarkan pengumuman kepada semua orang Kurdi untuk mengangkat senjata melawan kekuatan Pemerintah Irak dan menandai dimulainya revolusi Kurdi. Perang Irak-Kurdistan yang pertama terjadi pada tahun tersebut. Berkat usaha dan kegigihan Mustafa Barzani dalam memperjuangkan otonomi Kurdistan, pada tahun 1970 Partai Demokrasi Kurdistan yang dipimpin oleh Mustafa Barzani mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Irak terkait otonomi dan keterlibatan politik dalam pemerintahan Irak (KRG, 2017a). Tahun 1970 juga merupakan akhir dari perang pertama antara Irak dengan Kurdistan. Sayangnya pada tahun 1974 beberapa kesepakatan penting antara Kurdistan dan Irak tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan perselisihan.

Pada tahun 1976-1979 merupakan tahun di mana Pemerintah Irak menerapkan Arabisasi pada Kurdistan Irak yang menyebabkan pemberontakan PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*). Dengan adanya kejadian ini lima pemimpin Dawa Islam Syi'ah (*Shiite Islamic Dawa Party*) dijatuhi hukuman mati dan terbunuh saat Saddam Husein mengkonsolidasikan kekuasaannya pada tahun 1979 (ABC, 2006).

Selama terjadinya Perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988, Kurdistan melakukan pemberontakan. Hal ini dikarenakan Perang Irak-Iran melibatkan klaim kedua negara tentang etnis Kurdi dari sekte Fayli. Etnis Kurdi tersebut diusir dari daerah Irak karena Saddam Husein menganggap mereka sebagai bangsa Iran, dan Iran merupakan musuh Irak (ABC, 2006).

Pada masa kepemimpinan Saddam Husein, yang sangat condong dengan etnis Arab, hingga tahun 1988 telah melakukan pembantaian terhadap etnis Kurdi sebanyak dua kali (Hasan, 2017). Kurdi Irak telah menjadi korban genosida<sup>3</sup> kepemimpinan Saddam Husein dari tahun 1970 yang dipelopori oleh partai Baath yang mendukung Saddam Husein (Hardoko, 2017). Hingga pada tahun 1991 setelah Perang Teluk tiga provinsi di Irak yang diduduki oleh etnis Kurdi, yaitu Erbil, Sulaimaniyah, dan Dahuk berada di bawah perlindungan PBB dan pasukan koalisi Internasional. Hal ini dilakukan untuk melindungi etnis Kurdi dari serangan militer yang dilakukan oleh pemerintahan Saddam Husein (Tripp, 2000:253-259).

Selain itu, pada masa kepemimpinan Saddam Husein ini Pemerintah Irak memiliki praktek “penghilangan” dalam Operasi Anfal yang mana dalam operasi tersebut bertujuan untuk memberantas etnis Kurdi yang ada di Irak. Amnesti Internasional telah mengantongi tujuh ribu nama orang hilang selama tahun 1988

---

<sup>3</sup> Pengertian genosida menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Komite Keenam (*Sixth Committee*) Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap suatu kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite Majelis Umum PBB, kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak mudah diidentifikasi termasuk kelompok politik didalamnya yang menyebabkan gangguan internasional dalam masalah politik dalam negeri suatu negara (Turangan, 2011).

dalam kurun waktu empat bulan. Sedangkan menurut Kurdistan, korban hilang mencapai 150.000-180.000 orang (Muhammad et al., 1997:1-2).

Sejak tahun 2003 Wilayah Kurdistan Irak telah mendapat hak otonomi dan dapat memilih Presiden sendiri beserta 17 menteri dan parlemennya (Misrawi, 2017). Kurdistan memiliki Presiden dan Perdana Menteri. Perdana Menteri Kurdistan dibantu wakilnya mengepalai 17 Menteri yang terdiri dari Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air, Menteri Budaya dan Pemuda, Menteri Pendidikan, Menteri Penerangan, Mneteri Sumbangan dan Urusan Agama, Menteri Keuangan dan Ekonomi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah, Menteri Perumahan dan Rekonstruksi, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Sosial, Menteri Martir dan Urusan Anfal, Menteri Kota dan Pariwisata, Menteri Sumber Daya Alam, Menteri Urusan Peshmerga, Menteri Perencanaan, Mneteri Perdagangan dan Industri, serta Menteri Perhubungan dan Komunikasi (Monalisa, 2017).

Pada tanggal 30 Januari 2005 Irak telah memberikan hak otonomi *de facto* secara penuh terhadap Kurdistan dan berstatus sebagai *proto-state* (Christiastuti, 2017). Pada tahun 2005 ini, Irak menjanjikan kepada Kurdistan mendapatkan jatah dana sebesar 17 persen dari anggaran Irak sebagai kompensasi dan pendapatan minyak yang dieksplorasi oleh Pemerintah Irak di wilayah Kurdistan. Tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Irak dan Kurdistan merasa kecewa akan pembagian dana tersebut yang tidak mulus dalam hal pencairan dan pembagian dana (Misrawi, 2017). Pada tahun yang sama Pemerintah Irak dan Amerika Serikat melakukan sebuah kesepakatan dengan etnis Kurdi, apabila etnisnya menduduki jabatan tinggi dipemerintahan, maka etnis Kurdi tidak diperbolehkan untuk memisahkan diri dari Irak. maka pada pemilu tahun 2005 terpilihlah Jalal talabani sebagai Presiden Irak pertama yang beretnis Kurdi (Ganggas Danisworo, Cahyo Utomo, & Astuti, 2013).

Otonomi yang diberikan Pemerintah Irak kepada Kurdistan juga merupakan dasar legalitas untuk membentuk pasukan militer sendiri. Peshmerga merupakan pasukan militer wilayah Kurdistan. Pasukan militer ini memiliki personil yang jumlahnya mencapai 200.000 tentara. Peshmerga merupakan

pasukan militer terkenal karena keterlibatannya dalam penumpasan ISIS Bersama dengan Pemerintah Irak, Iran, Suriah, Turki, dan Rusia dan koalisi Barat (KRG, 2017d). Selain pasukan militer, Kurdistan juga memiliki parlemen atau badan legislatif tersendiri yang dipilih secara regional dan jumlah kursi dalam parlemen Kurdistan adalah 111 kursi. Adapun tiga fungsi utama badan legislatif Kurdistan adalah memeriksa proposal undang-undang baru, meneliti kebijakan dan administrasi pemerintah, serta memperdebatkan isu utama pada hari itu (KRG, 2012).

Kurdistan Irak merasa memiliki peranan penting dalam penumpasan ISIS yang merebut sepertiga wilayah Irak hampir tiga tahun yang lalu (2015). Kampanye militer ini didukung oleh Amerika Serikat dan Kurdistan diberi tawaran berupa pemerintahan terpisah dari Irak setelah ISIS dikalahkan (Hanna Azrya Samosir, 2017). Sejak tanggal 17 Oktober 2016 ribuan pasukan militer Irak, pejuang Peshmerga Kurdi, anggota Sunni Arab dan milisi Syiah yang didukung oleh pesawat tempur militer Amerika Serikat terlibat dalam perebutan kembali kota Mosul, Irak yang telah dikuasai oleh ISIS (Antaraneews, 2017c). ISIS berhasil dikalahkan pada tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi (Wibisono, 2017).

Dengan adanya momentum ini, Kurdistan Irak memanfaatkannya untuk mengadakan referendum.

Referendum Kurdistan Irak diadakan pada tanggal 25 September 2017 untuk memperoleh suara rakyat terkait kemerdekaan bagi Kurdistan Irak (Antaraneews, 2017b). Sebanyak lima koma dua juta orang di tiga provinsi di Irak Utara, yaitu Erbil, Sulaimaniyah dan Dohuk, telah memenuhi syarat sebagai pemilih (Tsani, 2017). Referendum ini ditentang oleh Pemerintah Irak karena tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut pihak Pemerintah Regional Kurdistan referendum ini dilakukan guna memberikan mereka mandat untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak (Maulana, 2017a). Hasil dari Referendum Kurdistan Irak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 sebanyak 92,73% memilih untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak (Aminuddin, 2017).

Pada tanggal 7 Juni 2017 Presiden Wilayah Kurdistan (KRG) Masoud Barzani mengumumkan bahwa Kurdistan akan mengadakan referendum pada tanggal 25 September 2017 demi mengupayakan kemerdekaan dari wilayah Irak, Pemerintah Irak, Turki, Iran, dan Amerika Serikat menentang referendum tersebut, dan mereka mengatakan hal tersebut akan mengancam keutuhan wilayah Irak dan mengganggu kestabilan wilayah tersebut (Muhaimin, 2017b). Kekhawatiran Pemerintah Turki, Iran dan Suriah terkait kemerdekaan Kurdistan Irak akan mengancam keutuhan wilayah negara mereka dengan memberi ilham terhadap warga Kurdi di masing-masing negara untuk memerdekakan diri (Kumparan, 2017).

Tidak hanya negara, organisasi regional Timur Tengah atau Liga Arab pun berharap referendum ini tidak terjadi dan menyarankan Kurdistan untuk berdialog terlebih dahulu dengan Irak alih-alih langsung melaksanakan referendum (Okezone, 2017). Tetapi permintaan Liga Arab ditolak oleh Kurdistan Irak (Maulana, 2017a). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan kekecewaannya akibat digelarnya referendum ini. Menurut Sekretaris Jenderal Antonio Guterres peluang negosiasi antara Kurdistan dengan Irak makin tertutup setelah adanya referendum ini. Selain itu, keputusan referendum yang diambil Kurdistan di kawasan sengketa dapat menimbulkan kerawanan kekerasan terutama di wilayah Kirkuk, menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric (Aminuddin, 2017).

Langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh oleh Pemerintah Irak untuk menanggulangi krisis politik yang terjadi dinegaranya melalui referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kurdistan Irak pada tanggal 25 September 2017. Mengingat banyaknya tekanan dan penolakan atas terlaksananya referendum ini oleh berbagai pihak.

Hal yang menjadi menarik untuk diteliti adalah analisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak dalam menghadapi etnis Kurdi dan Wilayah Regional Kurdistan (KRG) mengingat etnis Kurdi telah diberi keleluasaan dalam berotonomi tetapi pada akhirnya tetap memilih untuk memisahkan diri melalui referendum kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 25 September 2017.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak bukanlah kebijakan yang bersifat rayuan agar KRG tidak memisahkan diri dari Irak, namun lebih kepada tekanan dan batasan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dari karya tulis ilmiah, hal ini dikarenakan rumusan masalah haruslah mencakup bayangan tentang bagaimana masalah tersebut akan dijawab dalam sajian hasil penelitian karya ilmiah dan dapat menuntun penulis dalam penyusunan karya ilmiah dan memfokuskan penulis dalam mencari data. Rumusan masalah muncul berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menetapkan sebuah rumusan masalah yaitu:

**Bagaimana kebijakan Pemerintah Irak untuk mencegah kemerdekaan Kurdistan Irak pasca Referendum tahun 2017?**

## 1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan merupakan salah satu unsur penting dalam suatu penulisan karya ilmiah, karena ruang lingkup pembahasan dapat membantu penulis dalam membatasi ruang penelitian. Selain itu, ruang lingkup pembahasan membantu penulis dalam memfokuskan kajian yang akan ditulis. Ruang lingkup pembahasan juga dapat membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian itu sendiri. Terdapat dua ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu batasan materi dan batasan waktu.

### 1.3.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan oleh penulis untuk membatasi materi apa yang akan tercakup dalam tulisan karya ilmiah ini. Fungsi pokok dari batasan materi adalah untuk mengerucutkan pembahasan yang akan ditulis, sehingga memudahkan penulis dalam membuat karya ilmiah ini, dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah ini. Pada karya ilmiah ini penulis memberi batasan materi pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak dalam kaitannya dengan etnis Kurdi maupun KRG.



### **1.3.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam pembahasan fenomena yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2003 di mana merupakan tahun Kurdistan Irak diberikan hak otonomi yang luas oleh Pemerintah Irak. Kemudian batasan waktu akhir yang diambil oleh penulis adalah pada tahun 2018 atau tahun dimana penulis menyelesaikan tulisannya. Batasan ini diambil oleh penulis karena menurut penulis 2003 merupakan tahun di mana etnis Kurdi mulai mendapat keleluasaan untuk membentuk daerah otonomnya. Namun fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dimulai setelah terlaksananya referendum yaitu pada tanggal 25 September 2017 hingga berakhir di Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Irak pada tanggal 20 November 2017 dengan putusan bahwa referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tidak sesuai dengan konstitusi Irak dan hasilnya tidak berlaku lagi.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Irak untuk mencegah pemisahan diri Kurdistan Irak (KRG) dari kedaulatan negara Irak (dalam hal ini adalah mencegah kemerdekaan KRG yang dilandasi dengan diadakannya referendum).

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan landasan teori untuk dapat mengarahkan bagaimana karya ilmiah ini akan ditulis. Landasan konseptual atau kerangka pemikiran merupakan suatu konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan yang sebelumnya telah berhasil disusun (Suryana, 2010:23). Menurut Fred Chernoff (2007:38) teori memiliki cakupan prinsip umum baik berupa generalisasi universal maupun generalisasi probabilistik yang mencakup faktor atau variabel utama yang membantu peneliti dalam mengatur pengamatan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dunia dalam ranah teori. Dalam karya tulis ilmiah ini

penulis menggunakan konsep kebijakan menurut tomas Dye dan *Carrot and Stick Approach*.

### 1.5.1 Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan sering diartikan sebagai program, tujuan, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Untuk memudahkan dalam membedakan istilah-istilah diatas pengamat dan tokoh konsep kebijakan mendefinisikan kebijakan secara lebih sederhana. Menurut Syafiie dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tahir, 2011:38) istilah kebijakan dapat dibedakan dengan istilah kebijaksanaan karena kebijaksanaan merupakan perwujudan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat.

Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris biasa di sebut dengan *policy* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Menurut Tomas Dye dalam buku Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (2015:11) kebijakan merupakan hampir semua hal yang diputuskan maupun tidak diputuskan oleh pemerintah suatu negara. Menurut Carl J. Federick, kebijakan merupakan serangkaian tindakan ataupun kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Taufiqurokhman, 2014:2). Sedangkan menurut Sharkansky kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Irawati, 2015:11). Pada intinya kebijakan yang diambil oleh suatu negara merupakan langkah yang memiliki tujuan dan maksud didalamnya. Jika suatu masalah tidak pernah berada dalam agenda publik, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam membuat kasus untuk kepentingannya dan meningkatkan kesadaran tentang implikasi dari non-respon. Membuat suatu kasus biasanya melibatkan pengumpulan beberapa bukti yang mendukung kebijakan tersebut, seperti bukti yang relevan.

Ada beberapa cara untuk melihat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut Sherri Torjman, yaitu:

a. Kebijakan substantif dan administratif

Kebijakan ini berkaitan dengan undang-undang, program, dan praktik yang mengatur tentang aspek-aspek substantif dan kerja komunitas. Sedangkan kebijakan kedua lebih berfokus pada prosedur administratif, seperti pengumpulan data statistik evaluasi suatu program dan sebagainya.

b. Kebijakan vertikal dan horizontal

Kebijakan vertikal adalah apa yang kita anggap sebagai cara normal atau tradisional dalam pengambilan suatu kebijakan. Di mana dalam suatu struktur organisasi biasanya dimulai dengan kebijakan yang menyeluruh. Keputusan tersebut dibuat dan dikembangkan menjadi kebijakan yang dibuat cukup spesifik untuk memandu pengambilan keputusan secara operasional. Sebaliknya, kebijakan horizontal dikembangkan oleh dua atau lebih organisasi, yang mana masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menangani hanya satu dimensi dalam kondisi tertentu. Kebijakan horizontal disebut juga sebagai kebijakan terintegrasi di mana dibuat pada bagian-bagian organisasi atau di antara komponen suatu organisasi serupa dalam posisi hierarkis.

c. Kebijakan reaktif dan proaktif

Kebijakan reaktif muncul sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran atau krisis yang harus diatasi, seperti adanya keadaan darurat lingkungan dan bencana lingkungan. Sedangkan kebijakan proaktif merupakan suatu hal yang diperkenalkan dan dikejar melalui pilihan yang disengaja.

d. Kebijakan saat ini dan masa depan

Kebijakan saat ini adalah kebijakan yang tertera dalam agenda publik maupun yang tidak tercantum. Masalah yang telah tertera dalam agenda publik sering memiliki profil tinggi. Proses formal untuk mengubah dan memperbaiki pengaturan yang ada pada umumnya sudah ada didalamnya (Torjman, 2005:2-3).

### **1.5.2 Carrot and Stick Approach**

Pendekatan *Carrot and Stick* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh kaum realis untuk menjelaskan tentang *hard power* dalam Ilmu

Hubungan Internasional. Dasar dari pendekatan *Carrot and Stick* adalah pendekatan dari Pavlov tentang sistem hadiah dan hukuman. Menurut John Locke sistem hadiah dan hukuman merupakan sumber motivasi, di mana pendekatan ini akan memotivasi suatu aktor untuk menemukan perilaku yang ingin dilakukannya guna mendapat imbalan. Bahkan terkadang sistem kriminal mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

Pendekatan *carrot and stick* berasal dari cerita tentang keledai yang bercerita tentang cara terbaik untuk menjalankan keledai adalah menaruh wortel di ujung batang dan menggantungkannya di depannya, lalu memukulnya dengan tongkat. Wortel dianggap sebagai sebuah hadiah untuk membawa seekor lebah yang diletakkan di dalam gerobak yang ditarik oleh keledai dan tongkat dianggap sebagai hukuman. *Carrot and Stick Approach* pertama kali muncul dalam Ilmu Hubungan Internasional pasca Perang Dunia II dalam majalah *Economist* pada tanggal 11 Desember 1948. Pada awalnya pendekatan ini hanya dikenal sebagai *hard power*, namun semakin berkembang dan akhirnya dapat juga digunakan untuk pendekatan *soft power*. Pendekatan *carrot and stick* ditemui dalam *soft power* ketika membahas politik internasional. Kekuatan ekonomi tidak hanya milik wortel, namun juga tongkat. Tongkat dapat digunakan oleh kekuatan ekonomi sesuai keadaan (Akçay, Kanat, & Kelimeler, 2017:417-419).

Menurut James Andreoni dalam tulisannya yang berjudul *The Carrot or The Stick: Rewards, Punishments, and Cooperation* mengatakan bahwa adanya hukuman dan penghargaan terhadap suatu aktor dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Ketika aktor tersebut melakukan pekerjaan yang baik dan memuaskan maka akan diberi hadiah, begitu pula sebaliknya ketika aktor tersebut melakukan kesalahan atau melakukan pekerjaannya secara kurang memuaskan atau buruk akan diberi suatu hukuman (Andreoni, Harbaugh, & Vesterlund, 2003:893-901).

*Carrot and Stick Approach* menurut Ekrem Yasar Akçay (Akçay et al., 2017:419-420) menggunakan analisis tentang *hard power*, di mana wortel merupakan hadiah yang diberikan oleh negara kepada suatu aktor ketika menjalankan tugas dan mendapat imbalan, sedangkan Tongkat jika tidak

terpenuhi akan memperlihatkan bahwa negara lemah, cara mendisiplinkannya adalah dengan menggunakan tekanan ekonomi, politik, dan psikologis. Pendekatan ini digunakan negara untuk mendisiplinkan negara bagiannya (wilayah dalam negerinya dapat berupa negara bagian, kota, provinsi dan sebagainya).

Pasca Perang Dunia II pengaruh ekonomi semakin menguat di mana pendekatan *carrot and stick* juga ikut berpartisipasi dalam politik internasional. Pada tahun 1960-an konsep kekuasaan sistem semakin terlihat sebagai kemampuan untuk mengarahkan dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan militer sebagai basisnya. Pada tahun 1970-an kaum Neo-Realis telah bergeser kearah persepsi kekuasaan yang didefinisikan sebagai “*carrot and stick*” dalam bentuk praktik, yaitu “kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain kearah yang kita inginkan tanpa melanggar aturan yang ada” (Akçay, Kanat, & Kelimeler, 2017:419-420).

### **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan latar belakang dan teori yang digunakan, argumen utama yang dapat ditulis adalah bahwa untuk mencegah kemerdekaan Kurdistan Irak pasca referendum tahun 2017 Pemerintah Irak menerapkan kebijakan yang bersifat vertikal dan reaktif dengan menggunakan tekanan ekonomi, politik, dan psikologis sebagai tongkat atau hukuman atas apa yang telah dilakukan oleh Kurdistan Irak. Pendekatan ini digunakan negara untuk mendisiplinkan negara bagiannya yang tidak lagi sejalan dengan Pemerintah Irak. Selain kebijakan yang menerapkan hukuman untuk KRG, Pemerintah Irak juga menawarkan *carrot* atau hadiah jika KRG bersedia membatalkan hasil referendum dan tetap berada dalam kedaulatan Irak.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis untuk memfokuskan diri dalam pencarian data dan menentukan metode

apa yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam karya ilmiah yang ditulis.

### 1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dalam upaya mendukung hasil karya ilmiah yang sedang ditulis adalah dengan menggunakan metode dokumentasi atau *secondary sources*. Sumber data yang digunakan adalah catatan atau dokumen yang tersedia (Kuntjojo, 2009:15). Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik pembahasan dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam mengobservasi secara tidak langsung objek yang sedang diteliti dalam karya ilmiah ini. Data yang digunakan berupa buku, jurnal, berita melalui media cetak maupun elektronik, majalah, artikel, dan berbagai informasi yang di dapat dari internet dengan sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan topik yang dibahas. Adapun beberapa tempat yang relevan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Internet

### 1.7.2 Metode Analisa Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif. Hasil akhir dari metode ini adalah untuk menarik suatu kesimpulan dari sebuah deskripsi dan penjabaran fenomena yang ada. Metode kualitatif yang digunakan adalah *historical research*. Metode *historical research* merupakan metode yang menggali ulang tentang kejadian yang telah berlalu (Kuntjojo, 2009:16). Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengurutkan waktu dari kejadian yang lampau hingga saat ini. Di mana fokus penulisannya adalah pada sejarah etnis Kurdi, keterkaitannya dengan Irak, hingga referendum kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September

2017 dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak untuk mencegah kemerdekaan Kurdistan Irak pasca dilaksanakannya referendum pada tanggal 25 September 2017.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan karya tulis ilmiah ini secara struktural terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini akan membahas tentang latar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai masalah yang diangkat. Maka isi dari latar belakang adalah latar belakang mengenai hubungan Kurdistan dengan Irak hingga memunculkan masalah yang diambil oleh penulis. Selanjutnya, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai beberapa poin penting dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, mulai dari ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

#### **Bab 2 Profil Negara Irak dan Etnis Kurdi**

Dalam bab kedua ini, penulis akan mengulas tentang profil negara Irak dan etnis Kurdi. Serta hubungan yang terkait di antara keduanya.

#### **Bab 3 Kebijakan Pemerintah Irak Terhadap Etnis Kurdi dan Kurdistan Regional Government (KRG)**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa saja kebijakan Pemerintah Irak terhadap etnis Kurdi sebagai etnis minoritas terbesar dan tentang pemberian hak otonomi sebagai wujud dari permintaan etnis Kurdi sejak masa penjajahan Inggris.

#### **Bab 4 Analisis Kebijakan Pemerintah Irak untuk Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis tentang kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Irak untuk mencegah kemerdekaan Kurdistan Irak pasca referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Kurdistan Irak pada tanggal 25 September 2017. Kebijakan yang dianalisis berfokus pada

kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Irak pasca diadakannya referendum.

### **Bab 5 Kesimpulan**

Bab ini merupakan bagian terakhir sekaligus penutup dalam penulisan karya ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya.



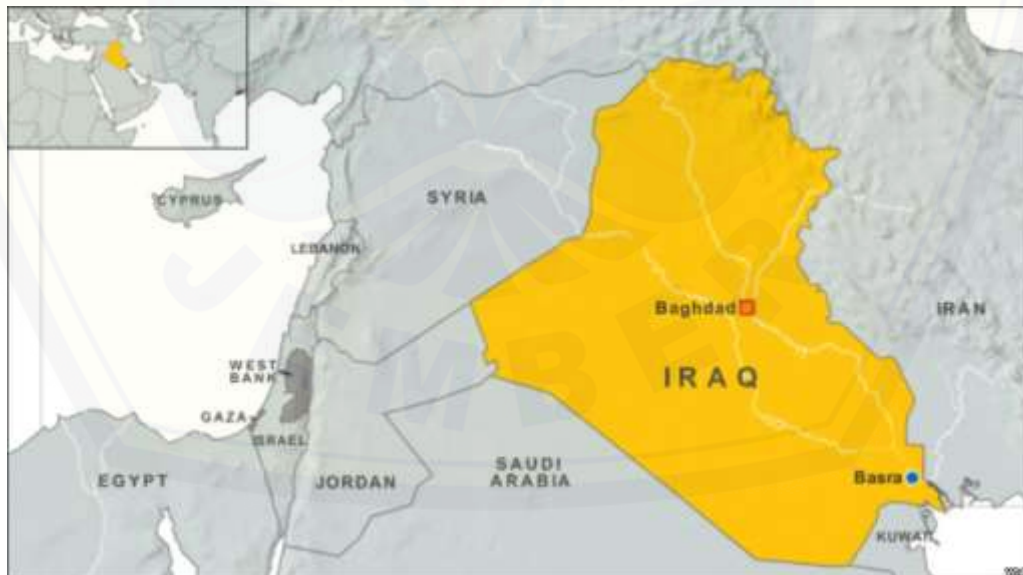


## BAB 2. PROFIL NEGARA IRAK DAN ETNIS KURDI

### 2.1 Profil Negara Irak

Irak terletak di kawasan Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Asia Barat dengan luas wilayah 437.072 kilometer persegi. Irak berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah lain, yaitu Turki di sebelah utara, Iran di sebelah timur, Kuwait di sebelah tenggara, Arab Saudi di sebelah selatan, Yordania di sebelah barat daya dan Suriah di sebelah barat. Gambaran tentang wilayah Irak dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.1. Baghdad merupakan Ibukota negara Irak dan merupakan kota terbesar di negara tersebut (KBRI, 2017).

Gambar 2.1 Peta Irak



Sumber: <https://gdb.voanews.com/>

Diakses pada tanggal 31 Mei 2018

Jumlah penduduk Irak mencapai tiga puluh tujuh juta jiwa dengan berbagai etnis (BBC, 2017a). Etnis mayoritas di Irak adalah etnis Arab. Serta memiliki beberapa etnis minoritas seperti Kurdi, Turkoman, Assyria, Mandean, Shabaki, Yazidi dan beberapa etnis minoritas lainnya. Agama mayoritas di Irak adalah agama Islam, di mana sembilan puluh tujuh persen penduduk Irak memeluk agama Islam dan tiga persen beragama Kristen atau lainnya. Adapun agama Islam yang dianut oleh penduduk Irak dibagi menjadi dua golongan yaitu Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Irak memeluk Islam Syiah yaitu sebanyak enam puluh persen (KBRI, 2017).

Bangsa Kurdi merupakan salah satu etnis yang ada di Timur Tengah yang kini menjadi salah satu etnis minoritas yang ada di Irak. Etnis Kurdi tidak dapat digolongkan sebagai bangsa Arab, Persia maupun Turki. Mereka merupakan keturunan bangsa Indo-Eropa (Nuzulian, 2008:55). Sebelum terpecah etnis Kurdi menempati wilayah yang biasa disebut dengan Kurdistan. Mayoritas etnis Kurdi memeluk agama Islam Sunni, tetapi kedekatan mereka lebih kepada persamaan suku dari pada agama (CNN Indonesia, 2014). Wilayah tersebut terletak diantara empat negara, yaitu Irak, Iran, Turki, dan Suriah (Kiram, 2017). Sebelumnya Kurdistan merupakan wilayah luas dalam satu kesatuan (Firman, 2016). Populasi bangsa Kurdi berkisar 50 juta jiwa di seluruh dunia yang tersebar di Turki, Iran, Irak, Suriah, Yordania, dan berbagai negara Barat. Populasi etnis Kurdi berjumlah sekitar 10% dari total penduduk Suriah, 19% dari total penduduk Turki, 15%-20% dari total penduduk Irak, dan hampir 10% dari total penduduk Iran (CNN, 2017).

Wilayah “Kurdistan” terbentang seluas 74.000 mil persegi yang terletak di Turki Tenggara, Iran Barat Laut, Irak Utara dan sebelah Timur Laut Suriah (CNN, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Peta “Daerah Kurdistan”



Sumber: <https://www.google.com/maps/>  
Diakses pada tanggal 31 Mei 2018

Pada masa kekaisaran Ottoman wilayah kekuasaan Kurdi terbentang di provinsi Bitlis, Diyarbekir, Erzurom, Mamuret al-Aziz (Kharbut), Mosul dan Van, serta beberapa tinggal di daerah timur provinsi Damaskus (Jalil, 2017:30). Besarnya wilayah yang dimiliki Kurdi, menjadikannya sebagai bangsa terbesar yang tidak memiliki negara. Sebagai gantinya, kini Suku Kurdi menjadi etnis minoritas di empat negara yang mengausai wilayahnya.

Sejak masa kekuasaan Ottoman, daerah Kurdistan cukup mandiri. Hal ini terbukti dari dinasti lokal Jalili telah mengakar sebagai tuan tanah Mosul, serta sejumlah pemerintahan Kurdi yang setengah independen terutama dari dinasti Baban yang berkuasa di Sulaimaniyah dan mendominasi pegunungan Kurdi (Tripp, 2000:9). Setelah keruntuhan kekuasaan Ottoman, Kurdi bercita-cita untuk memiliki negara mereka sendiri. Ketidakpuasan mereka sebagai etnis minoritas pada kekuasaan yang menaunginya meledak secara bertahap, pertama di bawah

kependudukan Inggris dan kemudian pada masa setelah Irak merdeka (Ottaway & Kaysi, 2012:3).

Memasuki masa etnis Kurdi berada dibawah naungan beberapa negara, etnis ini cenderung fanatik dan radikal. Buktinya adalah mereka lebih senang membuat aturan dan undang-undang sendiri yang akan menguntungkan etnisnya daripada berusaha berkompromi dengan peraturan dan undang-undang yang ada di negara tersebut. Hal ini mereka lakukan karena mereka merasa dianaktirikan di negara yang menaunginya. Sejak awal pemisahan “Daerah Kurdistan” etnis Kurdi tidak pernah merasa sebagai suatu bagian dari negara yang menaunginya, tetapi merasa sebagai “bangsa Kurdi” dan wilayah yang mereka tinggali merupakan “Daerah Kurdistan”. Hal ini pula yang sering menjadi pemicu perselisihan antara negara pusat dan etnis Kurdi. Selain itu, mereka akan sangat mudah terprovokasi untuk menjadi penghancur atau perusak stabilitas negara yang menaunginya (Alhasany, 2018).

### **2.1.1 Sejarah Singkat Irak**

Perang Dunia I merupakan saksi keruntuhan Kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman merupakan suatu kerajaan yang menguasai sebagian besar dataran Timur Tengah. Pasca keruntuhannya, transisi di Timur Tengah tidak dapat dihindarkan. Peta-peta baru dibuat berdasarkan perkiraan kewarganegaraan berserta etnisnya dengan batas-batas wilayah yang terkesan kaku. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi ketika masa transisi adalah nasionalisme Kurdi. Mereka secara tegas menentang didirikannya negara-negara baru di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan bangsa Kurdi yang dulu berada dibawah kekuasaan Kerajaan Ottoman kini harus terpecah dibawah mandat, menyebabkan nasionalisme Kurdi tersebar di beberapa negara baru (Arikanli, 2010:3).

Irak merupakan salah satu negara yang terbentuk pasca runtuhnya Kerajaan Ottoman. Kemudian Irak berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris pasca keruntuhan Kekaisaran Ottoman yang terjadi setelah kekalahan Kerajaan Ottoman dalam Perang Dunia I. Hal ini dikarenakan kemenangan Eropa dalam Perang Dunia I dan membagi daerah Timur Tengah melalui Perjanjian Sykes-

Picot (Saeed & O'Sullivan, 2006:2). Inggris merupakan salah satu negara yang memenangkan Perang Dunia I. Setelah pembagian kekuasaan dalam Perjanjian Sykes-Picot, Inggris menjadi negara yang menaungi Irak. Fokus dari Inggris pasca Perang Dunia I adalah daerah Teluk Persia, hal ini dikarenakan Inggris ingin memperkuat pengaruhnya di semenanjung Arab. Sejak tahun 1916 Inggris memusatkan upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan serta mempertahankan hubungan diplomatik dan militer mereka di daerah tersebut. Kurdistan merupakan salah satu kendala bagi Inggris untuk menguasai Semenanjung Arab. Akhirnya dibuatlah kerja sama antar Inggris-Kurdistan di mana Inggris menjanjikan kemerdekaan bagi Kurdistan Selatan (terdapat dalam Perjanjian Sevres). Hal ini kemudian ditentang oleh beberapa tokoh Kurdi yang mengatakan bahwa wilayah Kurdistan terbentang hingga Sinna, Iran (Arikanli, 2010:3-10).

Kurdistan telah memperjuangkan kemerdekaannya semenjak runtuhnya Kerajaan Ottoman. Pada tahun 1920 mereka telah membentuk Komite Kemerdekaan Kurdistan.

Kemenangan Inggris dalam Perang Dunia I disambut positif oleh Kurdistan Selatan. Hal ini terbukti dengan ucapan selamat yang disampaikan secara resmi oleh Kurdistan Selatan. Selain itu hal ini juga menjadi kesempatan bagi Kurdistan Selatan untuk mendirikan negara merdeka dengan bantuan Inggris. Pada saat itu Kurdistan Selatan dipimpin oleh Sheikh Mahmud Barzinji. Kemudian Kurdistan Selatan juga menghubungi Inggris untuk menguasai wilayahnya dan memulihkan situasi mengerikan di daerah Kurdistan Selatan pasca Perang Dunia I. Mahmud sangatlah tidak menyukai Turki dikarenakan Turki merupakan negara yang mewarisi sisa kekuasaan Kerajaan Ottoman dan memiliki ambisi untuk menguasai daerah Kurdistan Selatan (Jalil, 2017:48-49).

Ketika Inggris mulai menguasai daerah Irak, dengan kondisi daerah yang memiliki banyak masalah. Mulai dari masalah tentang konflik kekerasan antar penduduk desa dan suku, anarki, kebutuhan pedagang dan pengusaha lain untuk sistem hukum yang efektif, serta sistem hukum yang masih berantakan. Dengan banyaknya masalah yang ada di Irak, Inggris melakukan beberapa hal untuk

mengatasi masalah yang ada, yaitu dengan menghapuskan beberapa Lembaga yang dibentuk selama masa reformasi Usmani, termasuk dewan kota yang telah terpilih, yang digantikan oleh para pemimpin lokal yang mereka percayai untuk menjaga ketertiban desa (Johnson, 2004:12).

Selama masa penjajahan kolonial Inggris di Irak, Inggris menerapkan beberapa kebijakan, terutama untuk Kurdistan yang sangat mendukung kependudukan Inggris di tanah Mesopotamia. Mandat dari Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris adalah untuk mengurus suatu wilayah atas perantara Liga bangsa-Bangsa, salah satu wilayahnya adalah vilayet Irak. Tetapi karena adanya Revolusi Irak tahun 1920 mandat tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Kemudian Inggris mendirikan kerajaan Irak dengan nama *The Hashemite Kingdom of Iraq* atau المملكة العراقية الهاشمية pada tahun 23 Agustus 1921 dengan Raja Faisal I atau Faisal bin Hussein sebagai pemimpinnya yang merupakan seorang anggota berpengaruh di dunia Arab dan merupakan salah satu sekutu Arab pada masa perang Inggris, namun Raja Faisal bukanlah orang Irak. Kerajaan Irak yang baru dibangun saat itu masih berada di bawah mandat Inggris. Mandat Inggris tersebut berarti pembentukan monarki konstitusional dengan parlemen dan raja. Sebelum adanya mandat, Inggris menerapkan sistem pemimpin lokal yang bertugas sebagai pengganti dewan kota yang terpilih mulai memperkenalkan Peraturan Perselisihan Sipil dan Pidana (*Tribal Civil and Criminal Disputes Regulation*) untuk memberikan para sheiks yang berwenang untuk menyelesaikan semua perselisihan yang ada dalam suku mereka dan mereka juga bertugas untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintah. Kemudian para sheiks mendapatkan kucuran dana dari proyek-proyek pemerintah serta hibah tanah. Para sheiks ini beroperasi sebagai penopang penting bagi pembentukan politik yang ada di Irak. Mandat Inggris dimulai pada tanggal 25 April 1920, yang mana sebelum diberlakukannya mandat ini para sheiks mengeluarkan fatwa bahwa (suatu keputusan) bahwa mereka menentang adanya mandat dikarenakan tidak sesuai dengan hukum islam di mana pemimpin non-muslim tidak lah dibenarkan. Kemudian mereka menyerukan jihad dan menentang diberlakukannya mandat. Pemberontakan pun tidak dapat dihindarkan, pemberontakan ini berlangsung

selama tiga bulan dan menewaskan 6.000 orang warga irak dan 500 tentara Inggris dan India (Johnson, 2004:12-13).

Setelah berdirinya Kerajaan Irak, Inggris belum menentukan batas teritori bagi Kerajaan Irak terutama didaerah perbatasan dengan Turki yang diduduki oleh suku Kurdi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perjanjian Sevres bahwa daerah Kurdistan akan terbagi ke dalam empat negara, hal ini membuktikan adanya rencana untuk memisahkan bangsa Kurdistan. Sedangkan dalam perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Lausanne tidak disebutkan negara Kurdi, hanya persetujuan batas teritorial antara Irak dengan Turki. Jika dalam sembilan bulan Irak dan Turki tidak menyetujui batas teritorial ini, maka Liga Bangsa-Bangsa yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Pembagian dan batas teritorial yang ditetapkan adalah daerah-daerah Kurdi yang telah menjadi bagian dari Provinsi Mosul pada masa kekuasaan Ottoman diberikan kepada Irak, dengan syarat bahwa Kurdi akan diberikan posisi sebagai administrator, hakim, dan guru di Irak serta Bahasa Kurdi menjadi salah satu bahasa resmi di Irak. Dalam Perjanjian Protektorat Anglo-Irak pada tahun 1922 yang menegaskan bahwa Irak akan mengikuti nasihat-nasihat Inggris mengenai hal yang berkaitan dengan kepentingan Inggris selama dua puluh tahun kedepan (Johnson, 2004:14).

Permintaan Liga Bangsa-Bangsa terhadap Irak untuk memperlakukan Kurdi dengan baik tidak dijalankan sepenuhnya oleh Irak. Hingga pada bulan Februari 1929 perwakilan Kurdi mengirim sebuah petisi kepada Perdana Menteri Irak yang berisi bahwa rekomendasi dari Liga Bangsa-Bangsa untuk Kurdi tidak diikuti dan meminta lebih banyak biaya untuk pendidikan. Selama masa mandat kaum nasionalis Irak terus menyerukan kemerdekaan sepenuhnya bagi Irak.

Inggris memutuskan untuk mengakhiri mandatnya yang disertai dengan keluhan dari Kurdi yang menginginkan otonomi atau negara Kurdi yang sepenuhnya merdeka. Karena adanya keluhan tersebut Inggris beserta Pemerintah Irak merancang Undang-Undang bahasa yang berisi perlindungan bahasa Kurdi yang kemudian digabungkan dengan rancangan deklarasinya ketika bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa yang berisi “Bahasa Kurdi merupakan bahasa resmi irak yang mendampingi Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa resmi Irak”

(Johnson, 2004:14-15). Akhirnya pada tahun 1932 Kerajaan Irak diberikan kemerdekaan secara sepenuhnya oleh Inggris setelah Perjanjian Anglo-Irak yang berisi tentang kemerdekaan Kerajaan Irak dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan Britania Raya. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa Inggris akan mengusahakan pengakuan terhadap kedaulatan Kerajaan Inggris di Liga Bangsa-Bangsa dan menjadi negara yang sepenuhnya independen. Sebagai balasannya, Kerajaan Irak harus mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan militernya di Irak serta menyediakan seluruh fasilitas untuk pergerakan pasukan Inggris yang tidak terbatas. Selain itu, ada konsultasi yang terjadi diantara Irak dan Inggris dalam hal kebijakan luar negeri dan bantuan tibal balik selama sama perang.

Irak diterima oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai negara yang berdaulat pada tanggal 13 Oktober 1932 namun dengan pengaruh Kerajaan Inggris yang kuat karena terikat dalam Perjanjian Anglo-Irak. Terkait tanggapan Liga Bangsa-Bangsa terhadap keluhan etnis Kurdi dan komunitas kecil Kristen Assyrian atas diskriminasi yang dialaminya Pemerintah Irak mengeluarkan deklarasi untuk memperjuangkan hak-hak minoritas yang berada di perbatasan serta orang asing.

Raja Faisal I meninggal pada tahun 1933 karena sakit dan digantikan oleh putranya yaitu Raja Ghazi. Raja Faisal I merupakan sosok yang dikenal sebagai pemersatu Irak. Setelah Raja Ghazi diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, permasalahan pertama yang muncul adalah Raja Ghazi dianggap sebagai sosok yang tidak berpengalaman dalam segi politik dan tidak memiliki ketertarikan dalam politik. Masalah lain yang muncul adalah pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi pada bulan Agustus 1935 hingga Maret 1936 yang diikuti oleh deklarasi darurat militer di daerah Kurdistan. Kurdi pada saat itu juga banyak yang tidak mengikuti wajib militer yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Irak untuk memperkuat militer mereka. Masalah politik dalam negeri semakin runyam ketika pemberontakan ini menyebar hingga ke daerah lain. Selain itu, Perdana Menteri Yasin al-Hashimi mulai mengeluarkan undang-undang dengan surat keputusan dan meminta polisi dan intelijen negara untuk melacak orang-orang yang kontra dan kritis terhadap pemerintahan yang dipimpinnya serta koran-koran



oposisi ditutup dan tidak terbit lagi. Pelatihan militer mulai dimasukkan sebagai salah satu kurikulum yang ada di sekolah. Hal ini memperlihatkan kepemimpinan Yasin al-Hashimi yang cenderung diktator tidak disukai oleh pimpinan militer dan kerajaan. Selama kepemimpinan Raja Ghazi beliau lebih memihak terhadap nasionalis Arab dan menentang para sheik yang memperoleh posisi kuat di bawah Inggris.

Akibat kepemimpinan diktator ini Yasin al-Hashimi dikudeta. Kudeta tersebut dipimpin oleh Bakr Sidqi. Banyak kabinet yang terbentuk setelah itu, dari tahun 1937 hingga 1941 ada sebanyak 47 kabinet yang terbentuk serta percobaan kudeta militer sebanyak enam kali. Pada bulan April 1939 Raja Ghazi meninggal dunia dan digantikan putranya yang masih muda yaitu Raja Faisal II serta Nuri al-Sa'id sebagai perdana menteri. Namun gaya kepemimpinan Nuri al Sa'id berbanding terbalik dengan kepemimpinan Raja Ghazi yang menentang Inggris, karenan Nuri al Sa'id lebih memihak terhadap nasionalis Irak dan sering bekerjasama dengan Inggris.

Pada tanggal 1 April 1941 terjadi kudeta militer yang membawa mantan Perdana Menteri Rasid Ali al-Kaylani dan empat jenderal menjadi penguasa Irak. Kudeta yang dilakukannya tidak hanya untuk menggulingkan kekuasaan perdana menteri tetapi juga bupati. Bupati yang menjabat saat itu dituduh dengan mengambil tindakan yang tidak konstitusional serta merusak tentara dan persatuan nasional. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasyid Ali beserta keempat jenderal yang menyebabkan kekacauan politik Irak pada saat itu. Hingga Inggris memutuskan mengirim tentaranya untuk menduduki Irak yang menyebabkan Rasyid Ali dan keempat jenderal melarikan diri ke Mesir. Permasalahannya dengan Inggris adalah Inggris tidak diperbolehkan untuk mendaratkan tentara mereka di tanah Irak, hal ini membuat Inggris marah karena menurut Inggris hal ini melanggar Perjanjian Anglo-Irak tahun 1930. Akhirnya pada tanggal 30 Mei 1941 ditandatangani gencatan senjata dan membangun kembali kota. Akibat perbuatannya Rasyid Ali dan keempat jenderal diadili dan di hukum mati.

Pada tahun 1943 Perubahan struktur konstitusional dibuat melalui amandemen undang-undang. Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa raja

dimungkinkan untuk memecat kabinetnya, hal ini dilakukan untuk mencegah permusuhan pemerintahan dengan kerajaan. Selain itu, pada pasal 120 disebutkan bahwa raja dan dewan menteri diizinkan untuk menyatakan adanya keadaan darurat ketika terjadi hal yang membahayakan, pemberontakan, atau segala hal yang dapat membahayakan perdamaian. Dalam amandemen juga disebutkan bahwa partai politik dibatasi ruang geraknya dalam mengkritisi pemerintah.

Krisis politik terjadi pada tahun 1952. Hal ini dipicu kegagalan panen yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan berakhir dengan diumumkannya darurat militer. Krisis politik ini diperparah dengan tetap dilarangnya partai politik dan untuk mengkritisi pemerintah. Surat kabar saat itu juga ditangguhkan serta diberlakukannya jam malam bagi warga sipil. Pakta Baghdad yang ditandatangani pada tahun 1956 menambah krisis politik di Irak. Pakta Baghdad ini berisi tentang perjanjian pertahanan regional antara Inggris, Amerika Serikat, Pakistan, Irak, dan Iran. Hal ini membangun opini kaum nasionalis bahwa pemerintah pro terhadap Inggris. Setelah penandatanganan Pakta Baghdad, pemerintah memberlakukan darurat militer yang berguna untuk mengendalikan demonstrasi dan pemogokan yang menyebabkan beberapa ratus orang ditangkap.

Rencana rahasia direncanakan oleh beberapa perwira militer muda untuk melakukan kudeta guna menggulingkan kekuasaan pemerintah dan kerajaan. Baru lah pada tahun 1958 Irak benar-benar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Irak menyebut dirinya sebagai negara republik yang berdaulat (Johnson, 2004:16,21). Penggulingan pemerintah monarki yang dipimpin oleh Abd al-Karim Qasim pada tanggal 14 Juli 1958 berhasil dilakukan dengan membunuh raja dan diikuti dengan kembalinya Mustafa Barzani (pemimpin Kurdi) dari pengasingan. Penggulingan pemerintah monarki dilakukan dengan cara kudeta militer yang dilakukan oleh Angkatan Darat Irak untuk menggulingkan kekuasaan Raja Faishal II yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Irak (Nursalikhah, 2016). Sebuah konstitusi baru dibuat untuk negara Republik Irak yang menegaskan kekerabatan masyarakat Arab dan Kurdi, serta etnis minoritas lainnya sebagai satu negara-bangsa (Rogg & Rimscha, 2007:827). Maka setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai hari nasional di Irak.

Setelah menjadi negara yang berdaulat Irak mulai dengan mengamankan asset minyaknya, maka Undang-Undang Perminyakan disahkan pada tanggal 11 Desember 1961 yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol atas wilayah konsesi minyak yang belum dieksploitasi walaupun telah diberikan kepada Perusahaan Minyak Irak. Hal ini menegaskan bahwa hampir seluruh konsesi asli dikembalikan kepada pemerintah dan pendapatan negara meningkat dalam hal perminyakan. Pada awal tahun 1960an terjadi pemberontakan oleh etnis Kurdi yang diprakasai oleh militer yang merasa kekuasaannya semakin melemah. Ketika represi politik meningkat serta organisasi politik menjadi lebih tertutup. Pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Kurdi menyebabkan otonomi yang akan diberikan oleh Pemerintahan Abd al-Karim Qasim sehingga menyebabkan pertempuran antara tentara Irak dengan Kurdi. Hingga akhirnya Abd al-Karim Qasim digulingkan oleh lawan-lawannya yang diprakasai oleh Partai Ba'ath pada tanggal 8 Februari 1963 dengan mengambil alih situs-situs penting pemerintah termasuk stasiun radio dan Gedung milik Kementerian Pertahanan serta melakukan kudeta untuk melengserkan Abd al-Karim Qasim (Johnson, 2004:20-23).

Pada tahun 1963 hingga 1968 kondisi politik di Irak masih berkecamuk. Setelah kudeta pada bulan Februari 1963, Kolonel Abdul Salam Arif dan para pendukungnya yang ada di militer mengambil alih kudeta pada bulan November di tahun yang sama. Abdul Salam Arif kemudian menjadi penguasa baru Irak dengan aturan lima tahunnya. Pemerintahan Abdul Salam Arif didominasi oleh kalangan militer, kenalan, serta kerabatnya. Walau begitu pemerintahan Abdul Salam Arif banyak mendapat dukungan dari sipil maupun militer. Pada bulan Mei 1964, sebuah konstitusi disahkan yang menggambarkan bahwa Irak merupakan sebuah negara berdaulat yang menjunjung tinggi demokrasi dengan Islam sebagai agama resmi negara tersebut. Tak lama berselang rezim yang dibangun oleh Abdul Salam Arif dihadapkan oleh masalah ekonomi dan sosial yang kemudian diperburuk dengan adanya krisis kepercayaan bisnis dalam menghadapi ketidakstabilan politik. Pada tahun yang sama ditandatanganinya gencatan senjata antara Pemerintah Irak dengan Etnis Kurdi, namun hal ini tidak bertahan lama karena pada bulan April 1965 pertempuran pecah kembali (Johnson, 2004:23-25).

Dua tahun berselang, Irak memiliki peranan yang penting dalam Perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1967 hal ini menjadikan hilangnya legitimasi, seperti halnya konflik faksional, etnis, dan sektarian yang ada dalam rezim yang berkuasa (Johnson, 2004:25-26). Kemudian militer merencanakan sebuah kudeta pada bulan Juli 1968 dan Partai Ba'ath mengambil alih kekuasaan Irak serta pemimpin Partai Ba'ath yaitu Saddam Hussein menduduki posisi pemimpin Irak pada tahun 1968. Saddam Hussein seorang politikus terkenal di dunia internasional karena gaya kepemimpinannya yang cenderung rasis dan melanggar HAM.

### **2.1.2 Sistem Pemerintahan dan Pemilu di Irak**

Pada masa kekuasaan Kerajaan Irak di bawah mandat Inggris yaitu dari tahun 1922 hingga tahun 1932 terdapat Undang-Undang Organik yang berisi bahwa Pemerintah Irak terdiri dari sistem perwakilan dan monarki konstitusional yang kekuasaannya turun temurun. Selain itu, raja memiliki kekuasaan yang luas, termasuk hak untuk menegaskan semua undang-undang, menyerukan diadakannya pemilihan umum, menghentikan sesi parlemen maupun membubarkan parlemen, serta dapat mengeluarkan suatu peraturan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perjanjian tanpa konsultasi parlemen dan ketika parlemen tidak dalam sesi. Perdana menteri dipilih langsung oleh raja beserta para menterinya dengan rekomendasi perdana menteri. Parlemen Kerajaan Irak terbagi menjadi dua kamar, yaitu senat yang ditunjuk langsung oleh raja dan dewan perwakilan yang terpilih. Deputi dipilih setiap empat tahun sekali dengan sistem pemilihan tidak langsung. Pemilihan ini memiliki cara yaitu setiap 250 pemilih utama memilih satu pemilih sekunder (perwakilan mereka) untuk memilih wakil tersebut. Dalam hal ini kabinet bertanggung jawab kepada dewan deputi dan dapat mengundurkan diri secara paksa dengan adanya mosi tidak percaya (Johnson, 2004:14-15).

Selama masa Kerajaan Irak di bawah mandat Inggris, sistem keuangan Kerajaan Irak sepenuhnya dikendalikan oleh Inggris sehingga parlemen tidak dapat ikut campur dalam masalah keuangan. Pemilihan umum parlemen pertama

kali diadakan pada tahun 1925 setelah disahkannya Undang-Undang Organik yang mencakup segala hal tentang pemerintah monarki konstitusional Irak.

Kemudian pada masa awal pemilu pasca runtuhnya sistem monarki di Irak. Setelah kudeta yang dilakukan oleh para perwira militer muda Irak akhirnya dapat terlepas dari belenggu pemerintahan dengan sistem monarki konstitusional. Mereka menyerukan Proklamasi No. 1 yang menyatakan bahwa rezim republik telah berdiri di tanah Irak. Proklamasi dilanjutkan dengan mengumumkan bahwa pemerintahan baru telah terbentuk dan pada tanggal 26 Juli 1958 konstitusi sementara dibentuk. Dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa Irak merupakan bagian dari “Bangsa Arab” dan agama resminya adalah agama Islam, Kurdi dan Arab digambarkan sebagai mitra yang sejajar di negara ini (Johnson, 2004:20).

Pada masa kepemimpinan Saddam Husein dinyatakan bahwa Irak merupakan “Republik Demokratik Rakyat Berdaulat” (*Sovereign People’s Democratic Republic*). Pada awal rezim Saddam Hussein dibentuk Dewan Komando Revolusioner (*the Revolutionary Command Council/RCC*) yang dikukuhkan sebagai otoritas tertinggi dengan seorang presiden, wakil presiden, serta anggota pemerintah lainnya yang menikmati kekebalan hukum selama masa jabatannya. RCC memiliki hak untuk meratifikasi semua undang-undang dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan keputusan implementasi. Dewan menteri diawasi langsung oleh sekretariat kepresidenan. Selama rezim Saddam Hussein setiap kabinet yang terbentuk minimal sepertiga dari kabinet tersebut adalah anggota Partai Ba’ath. Kabinet bekerja dengan cara melaksanakan kebijakan dari RCC dan tidak memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan (Johnson, 2004:25-27).

Sistem pemilu pada masa rezim Saddam Hussein berdasarkan undang-undang yang disahkan pada bulan Maret 1980 oleh RCC menyatakan bahwa 250 perwakilan dan pemungutan suara didasarkan pada distrik anggota tunggal, di mana setiap distrik akan diwakili oleh satu orang, dalam setiap distrik terdapat sekitar 250.000 orang yang tinggal didalamnya. Para kandidat pemilu harus memenuhi kualifikasi yang sebelumnya telah disetujui oleh komisi pemilihan yang ditunjuk (Johnson, 2004:27). Kualifikasi yang harus dipenuhi adalah harus

berumur setidaknya 25 tahun, telah menjadi warga negara Irak sejak lahir, tidak menikah dengan orang asing, dan memiliki seorang ayah berwarga negara Irak, seorang kandidat dapat memiliki seorang ibu berwarga negara asing selama kewarganegaraan tersebut berasal dari negara arab lainnya.

Setelah digulingkannya Saddam Hussein melalui invasi Amerika Serikat, Irak kembali menjadi negara yang lebih demokratis.

### 2.1.3 Militer Irak, Peshmerga, dan ISIS

Irak tidak lepas dari peran militernya. Hal ini dikarenakan Irak merupakan salah satu negara yang terkait dengan *Al-Qaeda* dan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). *Al-Qaeda* terbentuk pada tahun 1990 merupakan sebuah kekhalifahan ekstrimis jihadis Sunni yang bermarkas di Irak dan Suriah (sesuai namanya). *Al-Qaeda* mulai terkenal pasca invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Hal ini dikarenakan runtuhnya rezim Saddam Husein mengakibatkan kehancuran infrastruktur yang dimiliki oleh militer Irak, selain militer kehancuran juga terjadi di sektor ekonomi dan politik Irak. Kondisi ini memudahkan *Al-Qaeda* sebagai salah satu gerakan destruktif (Rijal, 2015:49). ISIS merupakan pecahan dari *Al-Qaeda* yang secara resmi diproklamirkan oleh pemimpinnya Abu Bark al-Baghdad di Mosul pada tahun 2014. Ambisi yang diusung oleh kelompok militan ini adalah untuk menciptakan negara “khalifah” yang mereka yakini di wilayah Irak dan Suriah. Sejak diproklamirkan oleh pemimpinnya ISIS memulai aksinya dalam menguasai daerah yang mereka klaim dengan melakukan pembunuhan brutal terhadap pasukan militer Irak dan kelompok minoritas Irak. ISIS menyerang kelompok Yazidi dan ribuan perempuan Yazini ditangkap kemudian dijadikan budak seks mereka (Muhaimin, 2016). Pada tahun 2014 ISIS telah menguasai sebagian besar wilayah yang ada di Irak dan Suriah dengan memeberlakukan sistem “kekhalifahan” kepada sepuluh juta orang.

Setelah proklamasi yang dilakukan oleh pimpinan ISIS, Amerika Serikat membentuk Koalisi anti-ISIS yang terdiri dari puluhan negara yang ada di dunia. Namun dalam upaya pemberantasan ISIS Amerika Serikat secara aktif terlibat didalamnya dengan mengirimkan ribuan pasukan militernya ke Irak dan Suriah.

Setelah kepulangan pasukan militer Amerika Serikat pada tahun 2011, di tahun 2014 ini pasukan militer Amerika Serikat kembali berpangkal di Irak dalam usahanya memberantas ISIS. Laporan terbaru dari Pentagon pada tanggal 30 September 2017 sebanyak 1.720 tentara Amerika Serikat diterjunkan di Suriah dan sebanyak 8.892 tentara berada di Irak dalam upaya penumpasan ISIS (Perdana, 2017). Operasi pembebasan Mosul dimulai pada tanggal 17 Oktober 2016 dibawah komando Perdana Menteri Haider al-Abadi, Presiden Irak dan Panglima Angkatan Bersenjata Irak. Ada sekitar 60.000 pasukan militer dan polisi Irak bersama dengan pasukan relawan serta Peshmerga Kurdi ikut berpartisipasi dalam koalisi pembebasan Mosul ini (Pars Today, 2016a).

ISIS terus mengalami kekalahan dalam menguasai daerah yang didudukinya. Pada bulan Juli 2017 ISIS yang menguasai daerah Mosul berhasil dilumpuhkan oleh militer Irak. Raqqa, sebuah kota di Suriah yang diklaim ISIS sebagai 'ibukotanya' juga berhasil direbut kembali oleh pasukan anti-ISIS (BBC Indonesia, 2017b). Hal ini menandakan makin melemahnya kekuatan ISIS. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan bahwa pasukan Irak telah sepenuhnya menguasai perbatasan Irak-Suriah yang menandakan bahwa pasukan ISIS telah berhasil dikalahkan (BBC Indonesia, 2017b).

## **2.2 Profil Etnis Kurdi**

Bangsa Kurdi merupakan salah satu etnis yang ada di Timur Tengah. Etnis Kurdi tidak dapat digolongkan sebagai bangsa Arab, Persia maupun Turki. Mereka merupakan keturunan bangsa Indo-Eropa (Nuzulian, 2008:55). Etnis Kurdi menempati wilayah yang biasa disebut dengan Kurdistan. Mayoritas etnis Kurdi memeluk agama Islam Sunni, tetapi kedekatan mereka lebih kepada persamaan suku dari pada agama (CNN Indonesia, 2014). Wilayah tersebut terletak diantara empat negara, yaitu Irak, Iran, Turki, dan Suriah (Kiram, 2017). Sebelumnya Kurdistan merupakan wilayah luas dalam satu kesatuan (Firman, 2016). Populasi bangsa Kurdi berkisar dua puluh lima juta hingga tiga puluh juta penduduk di seluruh dunia. Populasi etnis Kurdi berjumlah sekitar sepuluh persen

dari total penduduk Suriah, Sembilan belas persen dari total penduduk Turki, lima belas hingga dua puluh persen dari total penduduk Irak, dan hampir sepuluh persen dari total penduduk Iran (CNN, 2017).

Catatan paling awal mengenai istilah ‘Kurdi’ ditemukan dalam dokumen Raja Tiglath-Pletser I yang memerintah Assyria dari tahun 1114 SM hingga 1076 SM yang menyebut bahwa daerah “Qurti” di gunung Azu merupakan salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh sang raja. Bagi orang Akkadia, sebutan “Kurti” digunakan untuk menunjuk mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Zagros dan Taurus timur, sedangkan orang Babylonia menyebut mereka dengan sebutan “Guti” dan “Kardu”. Sumber Yahudi (Talmud) beberapa kali menyebut tentang bangsa “Qarduim”. Sementara itu, dalam catatan ekspedisi Xenophon pada tahun 401 SM, menceritakan tentang pertemuannya dengan orang-orang “Kardykhoi”. Sebutan ini diikuti oleh Polybius (130 SM) yang menyebut mereka dengan istilah “Kyrtoi” dan Strabo (40 SM) yang kemudian dilatinkannya menjadi “Cyrtoi”. Menurut Izady, setidaknya sejak awal Masehi, istilah “Kurd” sudah mulai umum digunakan untuk menyebut siapa saja yang tinggal di daerah pegunungan dari Hormuz hingga Anatolia (Mizan, 2015:41).

Wilayah “Kurdistan” terbentang seluas 74.000 mil persegi yang terletak di Turki Tenggara, Iran Barat Laut, Irak Utara dan sebelah Timur Laut Suriah (CNN, 2017). Besarnya wilayah yang dimiliki Kurdi, menjadikannya sebagai bangsa terbesar yang tidak memiliki negara. Sebagai gantinya, kini Suku Kurdi menjadi etnis minoritas di empat negara yang mengausai wilayahnya.

Warga Kurdistan baru mulai memperjuangkan kemerdekaan dan tanah leluhurnya pada abad ke-19. Berbagai upaya mereka lakukan hingga membuahkan hasil perjanjian Sevres<sup>4</sup> pada tahun 1920 yang menyatakan bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan pada Kurdistan (Sahide, 2013:141). Tetapi perjanjian tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan daerah

---

<sup>4</sup> Perjanjian Sevres merupakan Perjanjian Perdamaian Inggris dengan Turki yang ditandatangani di kota Sevres, Perancis. Perjanjian ini mencakup tentang kemerdekaan Kurdistan yang dicantumkan dalam Bagian III pasal 62, 63, 64 (“Treaty of Peace with Turkey Lausanne,” 1923).



Kurdistan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga Inggris tidak pernah merealisasikan perjanjian tersebut.

### 2.2.1 Sejarah Singkat “Kurdistan”

Etnis kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang tinggal di daerah pegunungan yang saat ini merupakan daerah perbatasan antara Irak, Iran, Turki, dan Suriah. Etnis kurdi telah mendiami daerah tersebut selama 8000 tahun. Adapun sejarah Etnis Kurdi menurut Mehrdad R Izady, yang merupakan seorang pakar Kurdi dari Universitas Harvard menyebutkan bahwa sejarah Etnis Kurdi terbagi atas empat periode. Periode pertama adalah periode Halaf, yaitu dari tahun 6000 SM hingga 5400 SM. Periode kedua disebut sebagai periode al-Ubaid yaitu dari tahun 5300 SM hingga 4300 SM. Al-Ubaid merupakan sebuah nama gunung yang berada di utara Irak tempat di mana banyak ditemukannya peninggalan kuno terkait dengan Etnis kurdi. Penduduk Ubaid lah yang memberikan nama “Tigris” dan “Euphrates” untuk dua sungai utama yang ada di Irak yang mengalir dari daerah Kurdistan ke daerah Mesopotamia (sekarang Irak).

Periode ketiga disebut dengan zaman Hurri, di mana pusat kehidupan berpindah ke daerah pegunungan Zagros-Taurus-pontus dengan beberapa kerajaan kecil, antara lain Arrap’ha, Melidi, Washukasi dan Aratta. Sekitar tahun 2000 SM suku Hittite dan Mittani (Sindi) datang dan menetap di daerah Kurdistan. Kemudian pada tahun 1200 SM bangsa Arya (Indo-Eropa) melakukan invasi besar-besaran termasuk ke daerah Kurdistan, sehingga pada tahun 727 SM kerajaan Hurri berakhir. Selanjutnya muncul kerajaan Medes dengan ibukota yang berada di Ecbatana (Sekarang kota Hamadan di Iran) yang bertahan hingga 549 SM. Kaum Mees inilah yang diakui oleh Etnis Kurdi sebagai nenek moyang mereka.

Periode keempat yang merupakan periode terakhir disebut dengan periode Semitik dan Turkik, di mana dalam periode ini terjadi interaksi antaran orang Medes dan Yahudi, Nasrani dan Islam (Arab), serta asimilasi mereka dengan bangsa Turki, hal ini terbukti dengan adanya nama kabilah seperti Karachul, Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva, dan sebagainya (Mizan, 2015:39-41).

Memasuki masa kekuasaan Ottoman, daerah Kurdistan cukup mandiri. Hal ini terbukti dari dinasti lokal Jalili yang mana etnis Kurdi telah menjadi tuan tanah di Mosul. Etnis Kurdi yang menguasai Sulaimaniyah pada masa dinasti Baban telah menjadi daerah yang setengah independent dan mendominasi pegunungan Kurdi (Tripp, 2000:9). Setelah runtuhnya kekuasaan Ottoman, etnis Kurdi bercita-cita untuk memiliki negara mereka sendiri. Ketidakpuasan mereka sebagai etnis minoritas pada kekuasaan yang menaunginya meledak secara bertahap, pertama di bawah kependudukan Inggris dan kemudian pada masa setelah Irak merdeka (Ottaway & Kaysi, 2012:3). Kependudukan Inggris dan Perancis pasca Perang Dunia Pertama di tanah Arab menjadikan daerah “Kurdistan” terbagi ke dalam empat negara (Arikanli, 2010:8). Keempat negara tersebut adalah Irak, Iran, Turki, dan Suriah.

Memasuki masa di mana etnis Kurdi berada di bawah naungan beberapa negara yang mana etnis Kurdi cenderung fanatik dan radikal. Hal ini dibuktikan dengan etnis Kurdi yang lebih senang membuat aturan dan undang-undang sendiri yang akan menguntungkan etnisnya daripada berusaha berkompromi dengan peraturan dan undang-undang yang ada di negara yang menaunginya tersebut. Etnis Kurdi melakukan hal ini dikarenakan mereka merasa dianaktirikan oleh negara yang menaunginya. Sejak awal perpecahan daerah “Kurdistan” etnis Kurdi tidak pernah merada sebagai bagian dari negara yang menaungi mereka saat ini. Sebaliknya, etnis Kurdi merasa bahwa mereka merupakan “Bangsa Kurdi” yang menduduki wilayah Kurdistan. Hal ini pula yang sering menjadi pemicu perselisihan antara negara yang menaunginya dengan etnis Kurdi itu sendiri. Selain itu, etnis Kurdi sangat mudah terprovokasi untuk menjadi penghancur dan perusak stabilitas negara yang menaunginya (Alhasany, 2018).

### **2.2.2 Etnis Kurdi di Turki**

Etnis Kurdi pertama kali berada di tanah Turki pada abad ke 15 M ketika Turki diberikan hibah berupa tanah oleh Khalifah Usmani (Kerajaan Ottoman) yang berada di daerah Diyarbakir. Pasca runtuhnya kerajaan Ottoman yang kemudian menjadi Turki sebagai negara terbesar yang mewarisi peninggalan Ottoman dengan pemimpin Turki Kemal Attaturk, etnis Kurdi diperlakukan

sebagai warga negara yang terpinggirkan. Pada saat itu etnis Kurdi dipandang sebagai hambatan nasionalisme bagi Turki.

Akhirnya terjadi konflik separatis yang berkepanjangan di Turki yang telah menghilangkan nyawa 30.000 orang. Pemberontakan yang dilakukan oleh Etnis Kurdi dilakukan pertama kali pada tahun 1920-an dan 1930-an. Akibat pemberontakan ini, Pemerintah Turki mengerahkan pasukan militernya dan wilayah tersebut dinyatakan sebagai wilayah militer tertutup yang melarang orang asing masuk wilayah tersebut dari tahun 1925 hingga tahun 1965. Penggunaan bahasa Kurdi dilarang, kata-kata Kurdi dan Kurdistan dihapus dari kamus dan buku-buku sejarah, dan Kurdi hanya disebut sebagai “Orang Turki Pegunungan” (Kholidi, 2016). Sebutan tersebut berlaku hingga tahun 1991.

Pada tahun 1970-an etnis Kurdi di Turki giat memperjuangkan kemerdekaannya. Mahasiswa beretnis Kurdi mendirikan partai yang bernama *Partiya Karkaran Kurdistan* (PKK) yang merupakan pelopor bagi etnis Kurdi memerdekakan diri dari Turki. Partai ini didirikan pada tahun 1978 dan pemimpin pertamanya adalah Abdullah Ocalan (Nuzulian, 2008:56-57). Pemerintah Turki secara tegas menolak nasionalis Kurdi maupun hak perwakilan mereka di parlemen. Pemerintah Turki benar-benar menolak mentah-mentah semua tuntutan Kurdi dalam representasi sosial, budaya, dan politik. Hal ini menjadi wajar karena Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menganggap bahwa PKK merupakan kelompok teroris.

Pada tahun 1983, sejumlah provinsi ditempatkan di bawah undang-undang darurat militer sebagai tanggapan atas kegiatan PKK sebagai separatis militan. Perang gerilya terjadi sepanjang sisa tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Pada tahun 1993, jumlah total pasukan keamanan yang terlibat dalam perjuangan di Turki tenggara adalah sekitar 200.000, dan konflik telah menjadi pemberontakan terbesar di Timur Tengah, di mana banyak daerah pedesaan dievakuasi, ribuan orang Kurdi dibunuh, dan banyak tambahan eksekusi hukuman yudisial dilakukan oleh PKK maupun pasukan militer Turki. Lebih dari 37.000 orang tewas dalam kekerasan dan ratusan ribu lainnya dipaksa meninggalkan rumah mereka. Situasi di wilayah tersebut telah mereda menyusul penangkapan pemimpin PKK

Abdullah Ocalan pada tahun 1999 dan pengenalan toleransi yang lebih besar untuk kegiatan budaya Kurdi, hal ini didorong oleh Uni Eropa. Namun, beberapa kekerasan politik masih berlangsung dan wilayah perbatasan Turki-Irak tetap dalam situasi yang menegangkan.

Etnis Kurdi yang berada di Turki menduduki wilayah seluas 190.000 kilometer persegi dan merupakan salah satu etnis minoritas di Turki. Etnis Kurdi di Turki sendiri pernah melakukan referendum kemerdekaan, namun berhasil digagalkan oleh Pemerintah Turki. Etnis kurdi di Turki berjumlah 20% dari total penduduk Turki serta angka kelahiran etnis Kurdi 50% lebih tinggi dari pada etnis Turki. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Turki secara demografis, karena ada kemungkinan etnis Kurdi akan menjadi etnis mayoritas di Turki. Selain itu, etnis Kurdi memiliki popularitas yang signifikan di Turki. Etnis Kurdi memiliki Bahasa dan kebudayaan tersendiri dan merupakan suatu kelompok yang besar dengan sistem sosial yang tinggi.

### **2.2.3 Etnis Kurdi di Iran**

Etnis Kurdi yang berada di Iran merupakan salah satu etnis minoritas dengan jumlah etnis sebesar 7% dari total penduduk Iran. Luas wilayah daerah yang diduduki oleh etnis Kurdi di Iran seluas 125.000 kilometer persegi. Etnis Kurdi menduduki provinsi Azerbaijan Barat, provinsi Kurdistan, provinsi Kermanshah, provinsi Ilam, serta provinsi Hamadan. Ada juga beberapa etnis Kurdi yang tinggal di provinsi Khorasan Utara. Etnis Kurdi di Iran menganut Islam Sunni dan sebagian juga menganut Islam Syiah. Etnis Kurdi yang mengnut Islam Syiah disebut sebagai Feyli, mayoritas mereka menduduki provinsi Kermanshah serta wilayah di sekitar Kheneghin. Nasib etnis Kurdi di Iran tidak jauh berbeda dengan nasib etnis Kurdi di Turki. Mereka hidup sebagai warga negara yang dipinggirkan. Etnis Kurdi di Iran juga menjadi pemberontak.

Kelemahan pemerintah Persia selama Perang Dunia I mendorong beberapa kepala suku Kurdi untuk memanfaatkan situasi yang kacau ini. Simko, kepala suku Shikak, mendirikan otoritasnya di daerah barat Danau Urmia dari 1918 hingga 1922. Wilayah Sultan Hewraman Jaafar menguasai wilayah antara Marivan dan utara Halabja dan tetap merdeka sampai 1925. Pada tahun 1922,

Reza Khan (yang kemudian menjadi raja Pahlavi pertama), mengambil tindakan terhadap para pemimpin Kurdi. Simko terpaksa meninggalkan wilayahnya pada musim gugur 1922, dan menghabiskan delapan tahun bersembunyi. Ketika pemerintah Iran membujuknya untuk menyerah, dia disergap dan dibunuh di sekitar Ushno (Oshnavieh) pada tahun 1930. Setelah itu, Reza Shah mengeluarkan kebijakan yang tegas namun efektif terhadap suku Kurdi. Ratusan kepala suku Kurdi dideportasi dan dipaksa mengasingkan diri. Tanah mereka juga disita oleh pemerintah (KIBLAT, 2014).

Ketika pasukan Sekutu memasuki Iran pada bulan September 1941, Tentara Persia dengan cepat dibubarkan dan amunisi mereka disita oleh suku Kurdi. Anak-anak dari para pemimpin Kurdi merebut kesempatan dengan melarikan diri dari pengasingan mereka di Teheran. Hama Rashid, seorang pemimpin Kurdi dari Baneh, menguasai Sardasht, Baneh dan Mariwan di Iran barat. Dia akhirnya diusir dari wilayah oleh Tentara Persia pada musim gugur 1944 (Elphinston, 1946).

Meskipun Iran telah menyatakan netralitasnya dalam Perang Dunia Kedua, namun pada akhirnya Iran tetap diduduki oleh pasukan Sekutu. Dengan dukungan dari Uni Soviet, sebuah negara Kurdi dibentuk di kota Mahabad pada tahun 1946 oleh Gerakan Kurdi yaitu *Komeley Jiyanevey Kurd* di bawah kepemimpinan Qazi Muhammad. Karena entitas sangat kecil diperpanjang tidak lebih dari kota-kota kecil Mahabad, Bukan, Piranshahr, dan Oshnaviyeh di Iran, bahkan tidak semua Kurdistan Iran mendukung eksperimen, apalagi Kurdi di negara lain. Republik Mahabad, seperti yang sering disebut, berlangsung kurang dari setahun, karena berakhirnya perang dan penarikan pasukan Uni Soviet dari Mahabad memungkinkan Pemerintah Iran untuk mengalahkan separatis dan mengembalikan Kurdistan ke Iran (KIBLAT, 2014).

Organisasi politik Kurdi adalah pendukung revolusi yang antusias terhadap Shah, yang membawa Ayatollah Khomeini berkuasa pada bulan Februari 1979. Shah telah menunjukkan dirinya bukan teman aspirasi Kurdi untuk otonomi yang lebih besar dan melonggarkan kontrol Teheran atas urusan mereka. Suku Kurdi, dengan bahasa dan tradisi mereka yang berbeda dan aliansi lintas batas

mereka, dipandang rentan terhadap eksploitasi oleh kekuatan asing yang ingin mengacaukan republik muda. Krisis semakin parah setelah orang-orang Kurdi ditolak dalam pertemuan "Majelis Ahli" pada tahun 1979, yang bertanggung jawab untuk menulis konstitusi baru. Ayatollah Khomeini mencegah Dr. Ghassemlou, wakil terpilih dari daerah, dari berpartisipasi dalam pertemuan pertama para ahli.

Gelombang nasionalisme melanda Kurdistan timur setelah jatuhnya Dinasti Pahlavi sejalan dengan serangkaian pemberontakan anti-revolusioner di seluruh negeri. Pada awal 1979 konflik bersenjata pecah antara faksi-faksi Kurdi bersenjata dan pasukan keamanan pemerintah revolusioner Iran. Pasukan Kurdi termasuk terutama Partai Demokratik Kurdistan Iran (KDPI) dan Komalah kiri (Organisasi Revolusioner dari Toilers Kurdi). Dalam sebuah pidato di bulan Desember 1979, Ayatollah Khomeini menyebut konsep etnis minoritas yang bertentangan dengan doktrin Islam. Khomeini juga menuduh orang-orang "yang tidak ingin negara-negara Muslim untuk bersatu" dalam menciptakan rasa nasionalisme di kalangan minoritas.

Sejak tahun 1990an, nasionalisme Kurdi telah menyebar hingga ke wilayah Kurdi Syiah sebagian karena kemarahan terhadap penindasan kekerasan oleh pemerintah terhadap Kurdi lebih jauh ke utara, tetapi David Romano menolak klaim seperti itu karena tidak ada bukti adanya pemberontakan gerilya yang aktif di daerah tersebut. Meskipun, ada kebangkitan baru gerakan identitas Kurdi di bagian selatan Kurdistan Iran, yang telah bangkit dari dekade pertama abad 21 yang menunjukkan dirinya dengan cara pembentukan kelompok bersenjata yang disebut Partisan dari Kurdistan Selatan (*Partisans of Southern Kurdistan/PSK*) dan beberapa organisasi lain khususnya tentang orang Yarsani dari bagian Kurdistan itu.

Semangat nasionalisme tersebut masih berkobar hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Etnis Kurdi di Iran mengalami banyak diskriminasi. Seperti eksekusi mati terhadap enam belas tahanan politik beretnis Kurdi hingga tahun 2010.

#### 2.2.4 Etnis Kurdi di Suriah

Jumlah penduduk etnis Kurdi yang berada di Suriah sebesar 8% dari total jumlah penduduk Suriah. Luas wilayah yang diduduki etnis Kurdi di Suriah seluas 12.000 kilometer persegi dan merupakan wilayah etnis Kurdi terkecil jika dibanding dengan etnis Kurdi yang berada di tiga negara lainnya. Populasi Etnis Kurdi di Suriah terkonsentrasi di provinsi Hasakah (perbatasan Suriah-Turki), provinsi Aleppo di wilayah Ain Arab (termasuk Kobani yang saat ini sedang mereka pertahankan dari serangan ISIS) dan Afrin, serta di provinsi Raqqah. Etnis Kurdi di Suriah juga memperjuangkan kemerdekaan yang mana kawasannya mencakup bagian selatan Turki hingga daerah utara Suriah dan utara Irak. Daerah yang diduduki oleh etnis Kurdi di Suriah merupakan daerah semi otonomi di kawasan Afrin.

Pada 23 Agustus 1962, Pemerintah Suriah melakukan sensus penduduk khusus hanya untuk provinsi Jazira, yang didominasi Kurdi. Akibatnya, sekitar 120.000 suku Kurdi di Jazira (20% warga Suriah) dilucuti dari kewarganegaraan Suriah mereka. Penduduk yang memiliki kartu identitas Suriah diberitahu untuk menyerahkannya kepada administrasi untuk pembaruan. Namun, banyak dari etnis Kurdi yang mengirimkan kartu mereka dan tidak menerima imbalan apa pun. Banyak yang dikategorikan sebagai *ajanib* ('orang asing'), sedangkan yang tidak berpartisipasi dalam sensus dikategorikan sebagai *maktumin* ('tidak terdaftar'), status yang lebih rendah daripada *ajanib*. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, menjadi terdidik, memiliki properti, berpartisipasi dalam politik, atau bahkan menikah. Dalam beberapa kasus, klasifikasi bervariasi bahkan dalam keluarga Kurdi: orang tua memiliki kewarganegaraan tetapi bukan anak-anak mereka, seorang anak bisa menjadi warga negara tetapi bukan saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Mereka Kurdi yang kehilangan kewarganegaraan mereka sering direbut dari tanah mereka, yang diberikan oleh negara untuk pemukim Arab dan Asyur. Sebuah kampanye media diluncurkan melawan suku Kurdi dengan slogan-slogan seperti '*Save Arabism in Jazira!*' dan '*Fight the Kurdish Menace!*' (Gorgas, 2009).

Kebijakan-kebijakan ini di wilayah Jazira bertepatan dengan awal pemberontakan Barzani di Kurdistan Irak dan penemuan ladang-ladang minyak di daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Suriah. Pada Juni 1963, Suriah mengambil bagian dalam kampanye militer Irak melawan Kurdi dengan menyediakan pesawat, kendaraan lapis baja dan kekuatan 6.000 tentara. Pasukan Suriah menyeberangi perbatasan Irak dan pindah ke kota Kurdi Zakho dalam mengejar pejuang Barzani.

Kebijakan Suriah pada 1970-an menyebabkan orang Arab bermukim di mayoritas wilayah Kurdi. Pada tahun 1965, pemerintah Suriah memutuskan untuk menciptakan pasukan Arab (*Hizam Arabi*) di wilayah Jazira di sepanjang perbatasan Turki. Sepanjang 300 kilometer dan lebar 10–15 kilometer, membentang dari perbatasan Irak di timur ke Ras Al-Ain di barat. Pelaksanaan rencana penjagaan Arab dimulai pada tahun 1973 dan orang-orang Arab Badui dibawa masuk dan dimukimkan kembali di daerah-daerah Kurdi. Toponimi daerah seperti nama desa di Arabisasi. Menurut rencana awal, sekitar 140.000 suku Kurdi harus dideportasi ke padang pasir selatan dekat Al-Raad. Meskipun para petani Kurdi kehilangan tanah mereka, mereka menolak untuk pindah dan menyerahkan rumah mereka. Di antara penduduk desa Kurdi ini, mereka yang ditetapkan sebagai orang asing tidak diizinkan memiliki properti, untuk memperbaiki rumah yang runtuh atau membangun rumah baru.

Pada bulan Maret 1986, beberapa ribu Kurdi yang mengenakan kostum Kurdi berkumpul di bagian Kurdi Damaskus untuk merayakan festival musim semi Newroz. Polisi memperingatkan mereka bahwa gaun Kurdi dilarang dan mereka menembaki kerumunan meninggalkan satu orang tewas. Sekitar 40.000 Kurdi ambil bagian dalam pemakamannya di Qamishli. Juga di Afrin, tiga orang Kurdi terbunuh selama demonstrasi *Newroz* (Yildiz, 2005).

Setelah insiden di sebuah stadion sepak bola di Qamishli, 65 orang tewas dan lebih dari 160 luka-luka dalam hari-hari bentrokan mulai dari 12 Maret 2004. Sumber dari etnis Kurdi menunjukkan bahwa pasukan keamanan Pemerintah Suriah menggunakan amunisi langsung terhadap warga sipil setelah bentrokan terjadi pada pertandingan sepak bola antara penggemar Kurdi dari tim lokal dan



pendukung Arab dari tim kunjungan dari kota Deir al-Zor. Pers internasional melaporkan bahwa sembilan orang tewas pada 12 Maret 2004. Menurut *Amnesty International*, ratusan orang, sebagian besar Kurdi, ditangkap setelah kerusuhan. Para tahanan Kurdi dilaporkan disiksa dan diperlakukan dengan buruk. Beberapa mahasiswa Kurdi diusir dari universitas mereka, dilaporkan karena berpartisipasi dalam protes damai.

Majelis Nasional Kurdistan Suriah dibentuk untuk mewakili Kurdi Suriah berdasarkan dua konferensi besar, satu di Senat AS pada Maret 2006 dan yang lainnya di parlemen Uni Eropa di Brussels pada tahun 2006. Majelis Nasional Kurdistan Suriah (*The Kurdistan National Assembly of Syria/KNAS*) mencari demokrasi untuk Suriah dan memberikan hak kepada Kurdi dan minoritas Suriah lainnya. Mereka berusaha mengubah Suriah menjadi negara federal, dengan sistem dan struktur demokratis untuk pemerintah federal dan pemerintah provinsi.

Etnis Kurdi di Suriah juga berupaya untuk memisahkan diri dari Suriah dan mendirikan negara berdaulat namun hal ini telah lama ditentang oleh Suriah dan Turki karena dianggap akan mengancam stabilitas kawasan. Penolakan Presiden Suriah Bashar al Assaad tentang pendirian negara bagi etnis Kurdi di Suriah serta menyebut etnis Kurdi sebagai “penghianat” Suriah dan akan memerangnya. Selain mendapat kecaman dari dalam negeri, aksi ini juga mendapat kecaman keras dari Turki yang merupakan negara tetangga dari Suriah sekaligus salah satu negara yang memiliki etnis minoritas Kurdi. Turki akan bersikeras untuk mencapai sebuah keputusan dengan Rusia yang merupakan penyokong utama Bashar al Assaad sebelum memerangi etnis Kurdi di Suriah (Reuters, 2018). Hal ini terjadi setelah ketegangan referendum kemerdekaan yang dilaksanakan di Irak.

### **2.2.5 Etnis Kurdi di Irak**

Irak merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki etnis beragam. Salah satu etnis yang menduduki Irak adalah etnis Kurdi. Etnis Kurdi yang mendiami Irak sekitar 15-20% dari total penduduk Irak (Muhaimin, 2017a). Jumlah etnis Kurdi di Irak mencapai 3.757.058 jiwa pada tahun 2002 (Kurdistan Regional Government, 2017). Mereka menduduki daerah

utara Irak yang meliputi daerah Sulaimaniyah, Kirkuk, Dahuk, dan Erbil. Ketiga daerah tersebut, kecuali Kirkuk yang masih menjadi daerah sengketa, adalah provinsi yang dijadikan bagian dari Daerah Otonomi Kurdistan (KRG). Daerah Kirkuk merupakan daerah kaya minyak yang ada di Irak (Mizan, 2015:27). Luas wilayah Kurdistan Irak adalah 40.643 kilometer persegi (Kurdistan Regional Government, 2017).

Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Kurdistan adalah agama Islam Sunni yang mengikuti ajaran Syafi'i. Selain agama Islam, adapun agama lain yang dianut oleh sebagian kecil penduduk Kurdistan. Agama minoritas tersebut adalah Kristen, yang meliputi Katolik Suriah, Ortodoks Suriah, Gereja Asiria Timur, Armenia, dan Katolik Chaldean. Selain itu ada juga agama Yazidisme, dan menganut Iman Kaka'i ("Religious Freedom and Tolerance," 2017).

Semangat kemerdekaan Kurdistan dipelopori oleh Sheikh Mahmoud Barzani yang merupakan Gubernur Sulaimaniyah dan menjabat pada tahun 1918 pada masa kolonial Inggris ("Contemporary History," 2017). Pada awalnya, kolonial Inggris mengangkat Barzani untuk memenangkan hati etnis Kurdi. Namun, pada kenyataannya setelah menetapkan Mahmoud Barzani sebagai gubernur Sulaimaniyah, Barzani memerintahkan penangkapan seluruh pejabat Inggris (Mizan, 2015:47). Hal inilah yang menyebabkan setahun setelah pelantikannya sebagai gubernur, Barzani diasingkan ke India. Karena takut akan kemarahan etnis Kurdi, pada tahun 1920 Mahmoud Barzani dipulangkan dari pengasingan dan diangkat menjadi "Gubernur Kurdistan Selatan" oleh Pemerintah Koloni Inggris. ("Contemporary History," 2017; Mizan, 2015:47-48).

Semangat Mahmoud Barzani dilanjutkan oleh Ahmad Barzani dan Mustafa Barzani. Tetapi kedua bersaudara ini lebih pada memperjuangkan hak otonomi Kurdistan Irak dari Kerajaan Irak bentukan Inggris (masih dalam kendali kolonial Inggris). Pada tahun 1961 Mustafa Barzani meminta otonomi Kurdi terhadap Pemerintah Irak, namun permintaan tersebut ditolak. Sehingga pada tanggal 11 September 1961, Mustafa Barzani mengeluarkan pengumuman kepada semua orang Kurdi untuk mengangkat senjata melawan kekuatan Pemerintah Irak

dan menandai dimulainya revolusi Kurdi. Perang Irak-Kurdistan yang pertama terjadi pada tahun tersebut. Berkat usaha dan kegigihan Mustafa Barzani dalam memperjuangkan otonomi Kurdistan, pada tahun 1970 Partai Demokrasi Kurdistan yang dipimpin oleh Mustafa Barzani mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Irak terkait otonomi dan keterlibatan politik dalam pemerintahan Irak (“Contemporary History,” 2017). Tahun 1970 juga merupakan akhir dari perang pertama antara Irak dengan Kurdistan. Sayangnya pada tahun 1974 beberapa kesepakatan penting antara Kurdistan dan Irak tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan perselisihan.

Pada tahun 1976-1979 merupakan tahun di mana Pemerintah Irak menerapkan Arabisasi pada Kurdistan Irak yang menyebabkan pemberontakan PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*). Dengan adanya kejadian ini lima pemimpin Dawa Islam Syi’ah (*Shiite Islamic Dawa Party*) dijatuhi hukuman mati dan terbunuh saat Saddam Husein mengkonsolidasikan kekuasaannya pada tahun 1979 (ABC, 2006).

Selama terjadinya Perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988, Kurdistan melakukan pemberontakan. Hal ini dikarenakan Perang Irak-Iran melibatkan klaim kedua negara tentang etnis Kurdi dari sekte Fayli. Etnis Kurdi tersebut diusir dari daerah Irak karena Saddam Husein menganggap mereka sebagai bangsa Iran, dan Iran merupakan musuh Irak (ABC, 2006).

Etnis Kurdi merupakan etnis minoritas Irak yang mendapat tekanan brutal dari pemerintah yang dipimpin oleh suku Arab selama beberapa dekade sebelum memperoleh otonomi pada tahun 1991 secara *de facto* setelah Perang Teluk (KOMPAS TV, 2017). Pada masa kepemimpinan Saddam Husein, yang sangat condong dengan etnis Arab, hingga tahun 1988 telah melakukan pembantaian terhadap etnis Kurdi sebanyak dua kali (Hasan, 2017). Kurdi Irak telah dilaporkan menjadi korban genosida<sup>5</sup> kepemimpinan Saddam Husein dari tahun 1970 yang

---

<sup>5</sup> Pengertian genosida menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Komite Keenam (*Sixth Committee*) Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap suatu kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite Majelis Umum PBB, kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak mudah

dipelopori oleh partai Baath yang mendukung Saddam Husein (Hardoko, 2017). Hingga pada tahun 1991 setelah Perang Teluk tiga provinsi di Irak yang diduduki oleh etnis Kurdi, yaitu Erbil, Sulaimaniyah, dan Dahuk berada di bawah perlindungan PBB dan pasukan koalisi Internasional. Hal ini dilakukan untuk melindungi etnis Kurdi dari serangan militer yang dilakukan oleh pemerintahan Saddam Husein (Tripp, 2000:253-259).

Pada masa kepemimpinan Saddam Husein, Pemerintah Irak memiliki praktek “penghilangan” dalam Operasi Anfal yang mana dalam operasi tersebut bertujuan untuk memberantas etnis Kurdi yang ada di Irak. Amnesty Internasional telah mengantongi tujuh ribu nama orang hilang selama tahun 1988 dalam kurun waktu empat bulan. Sedangkan menurut Kurdistan, korban hilang mencapai 150.000-180.000 orang (Muhammad et al., 1997:1-2).

Sejak tahun 2003 Wilayah Kurdistan Irak telah mendapat hak otonomi dan dapat memilih Presiden sendiri beserta 17 menteri dan parlemennya (Misrawi, 2017). Dan pada tanggal 30 Januari 2005 Irak telah memberikan hak otonomi *de facto* secara penuh terhadap Kurdistan dan berstatus sebagai *proto-state* (Christiastuti, 2017). Pada tahun 2005 ini, Irak menjanjikan kepada Kurdistan kucuran dana sebesar 17 persen dari anggaran Irak sebagai kompensasi dan pendapatan minyak yang dieksplorasi oleh Pemerintah Irak di wilayah Kurdistan. Tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Irak dan Kurdistan merasa kecewa akan pembagian dana tersebut yang tidak mulus dalam hal pencairan dan pembagian dana (Misrawi, 2017).

Pada bulan April 2012, Kurdistan Irak menghentikan ekspor minyak sebagai upaya protes terhadap pemerintah pusat akibat tunggakan yang belum dibayarkan kepada Kurdistan Irak selama sepuluh bulan (VOA Indonesia, 2012). Per tanggal 7 Agustus 2012 Kurdistan Irak mulai mengekspor kembali minyaknya kepada Turki. Hal ini memicu ketegangan dengan Pemerintah Irak karena dinilai hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Dikarenakan ekspor tersebut merupakan

ekspor minyak yang terjadi langsung antara Kurdistan Irak (KRG) dengan Turki tanpa adanya campur tangan Irak. Hal ini didukung oleh Turki (Mardiani, 2012).

Otonomi yang diberikan Irak kepada Kurdistan merupakan legalitas untuk membentuk pasukan militer sendiri. Peshmerga merupakan pasukan militer wilayah Kurdistan. Pasukan militer ini memiliki personil yang jumlahnya mencapai 200.000 tentara. Peshmerga merupakan pasukan militer terkenal karena keterlibatannya dalam penumpasan ISIS Bersama dengan Pemerintah Irak, Iran, Suriah, Turki, dan Rusia dan koalisi Barat (“The Kurdistan Parliament,” 2017). Selain pasukan militer, Kurdistan juga memiliki parlemen atau badan legislatif tersendiri yang dipilih secara regional dan jumlah kursi dalam parlemen Kurdistan adalah 111 kursi. Adapun tiga fungsi utama badan legislatif Kurdistan adalah memeriksa proposal undang-undang baru, meneliti kebijakan dan administrasi pemerintah, serta memperdebatkan isu utama pada hari itu (Kurdistan Regional Government, 2012). Kurdistan memiliki Presiden dan Perdana Menteri. Perdana Menteri Kurdistan dibantu wakilnya mengepalai 17 Menteri yang terdiri dari Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air, Menteri Budaya dan Pemuda, Menteri Pendidikan, Menteri Penerangan, Menteri Sumbangan dan Urusan Agama, Menteri Keuangan dan Ekonomi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah, Menteri Perumahan dan Rekonstruksi, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Sosial, Menteri Martir dan Urusan Anfal, Menteri Kota dan Pariwisata, Menteri Sumber Daya Alam, Menteri Urusan Peshmerga, Menteri Perencanaan, Menteri Perdagangan dan Industri, serta Menteri Perhubungan dan Komunikasi (Monalisa, 2017).

### **2.3 Keterikatan Irak dan Etnis Kurdi**

Etnis Kurdi menjadi bagian dari negara Irak setelah Perang Dunia Pertama dan berada di bawah jajahan kolonial Inggris. Pada perjanjian Lausanne tahun 1923 disebutkan bahwa “wilayah” Kurdistan terbagi di empat negara, yaitu Irak, Iran, Turki, dan Suriah (Hapsari, 2012). Semenjak itulah keduanya memiliki keterikatan satu sama lain sebagai sebuah negara dan etnis minoritas. Dalam beberapa kasus dan kejadian yang terjadi di Irak, Kurdi berperan sebagai salah

satu tokoh yang muncul dan berperan penting didalamnya. Bagaimana pun keduanya merupakan satu kesatuan dalam negara Irak, namun karena adanya perbedaan yang mendasar menjadikan keduanya memiliki banyak perbedaan dan sering berselisih satu sama lain.

Adapun beberapa hal berbeda yang mendasari timbulnya berbagai konflik di antara kedua adalah sebagai berikut.

### **2.3.1 Etnis Minoritas vs Etnis Mayoritas**

Etnis Kurdi merupakan etnis minoritas yang berjumlah 3.757.058 jiwa atau setara dengan 15-20% dari jumlah penduduk Irak. Etnis Kurdi mayoritas menduduki wilayah utara Irak yang meliputi Sulaimaniyah, Dahuk, Erbil, dan Kirkuk. Luas wilayah daerah yang diduduki etnis Kurdi adalah 40.643 kilometer persegi (KRG, 2017a). Hal ini membuktikan bahwa etnis Kurdi merupakan etnis minoritas terbesar di Irak. Sedangkan Irak merupakan negara dengan penduduk mayoritas beretnis Arab.

Tidak hanya menjadi etnis minoritas, etnis Kurdi merupakan etnis minoritas yang berpengaruh di Irak. Hal ini terbukti dari keterlibatannya dalam perpolitikan Irak dan juga masuk dalam jajaran petinggi di Irak. Bahkan Presiden Irak saat ini, Fouad Masoum merupakan orang Kurdi yang diusung oleh Partai *Patriotic Union of Kurdistan* (PUK). Semenjak Pemilu tahun 2005 hingga pemilu 2014 Presiden Irak selalu berasal dari PUK yang merupakan partai etnis Kurdi. Selain itu, etnis Kurdi yang memiliki otonomi daerah berupa KRG juga dilengkapi dengan fasilitas pasukan militer yang biasa disebut dengan Peshmerga, pasukan militer yang dibentuk oleh etnis Kurdi dan memiliki peranan besar dalam memerangi ISIS.

### **2.3.2 Sengketa Wilayah Kirkuk**

Adanya perselisihan pendapat dan perebutan wilayah minyak, Kirkuk, menjadi salah satu perselisihan yang terjadi sampai saat ini. Pemerintah Irak tidak menyetujui ekspor langsung yang dilakukan oleh KRG. Istilah Pemerintah Irak mengenai ekspor dan pengembangan minyak yang dilakukan oleh KRG adalah Genel dan DNO “ilegal”. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Irak berulang kali menghentikan ekspor yang dilakukan oleh KRG karena sengketa

yang berlangsung antara KRG dan Pemerintah Irak (Katzman & Humud, 2016:21). Namun dalam konstitusi Irak hanya menyebutkan bahwa Pemerintah Irak mengendalikan ladang minyak tua beserta pemasukannya dan tidak menyebutkan siapa yang akan bertanggung jawab atas ladang yang baru (Ottaway & Kaysi, 2012:10-11). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu utama sengketa di Kirkuk.

Provinsi Kirkuk yang merupakan daerah sengketa karena kekayaan minyaknya secara historis tidak didominasi oleh orang Kurdi. Meskipun Pemerintah Irak telah mencoba mengubah komposisi demografis wilayah ini dengan memasukkan beberapa suku Arab didalamnya, tetapi suku Kurdi bersama dengan orang Turki menjadi penduduk mayoritas di provinsi ini. Pembagian kependudukan di provinsi ini adalah suku Kurdi mayoritas menduduki sebelah utara Kirkuk, suku Arab berada di daerah selatan Kirkuk, dan pusatnya didiami oleh Turkoman (orang Turki). Pasca invasi Amerika Serikat ke Irak, suku Kurdi berbondong-bondong memindahkan keluarganya di daerah Kirkuk, langkah ini ditentang oleh suku Arab dan Turki yang mendiami Kirkuk (Jawad, 2013:9). Konflik minyak dan wilayah Kirkuk merupakan sengketa antara Pemerintah Irak dan KRG yang tidak berkesudahan.

### **2.3.3 Pemerintah Irak vs KRG**

KRG merupakan daerah otonomi Irak yang memiliki konstitusi sendiri. Hal ini sejalan dengan Amerika Serikat di mana setiap negara bagiannya memiliki konstitusi sendiri. Namun konstitusi KRG harus ada dalam kerangka konstitusi federal Irak. Dengan demikian, ketentuan konstitusi KRG tidak dapat secara langsung melawan konstitusi Irak. Namun konstitusi KRG dapat mengendalikan masalah di wilayah kewenangannya jika konstitusi Irak tidak mencakup hal tersebut.

Konstitusi Irak merupakan landasan hukum yang berlaku bagi seluruh hukum yang ada di Irak, dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara undang-undang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai pemerintahan daerah, maka wewenang akan diberikan kepada pemerintah daerah. Adanya hal tersebut menjadikan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) mengeluarkan konstitusi daerah sendiri yang mencakup banyak

kausul yang bertentangan dengan pemerintah pusat, terutama dibidang pemanfaatan kekayaan nasional dan regional, seperti minyak. Hal ini tertera dalam Konstitusi Irak Pasal 115 “Prioritas berlaku untuk hukum regional jika terjadi konflik dalam negeri antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah” (Jawad, 2013:16). Hal inilah yang menjadi celah bagi KRG untuk membuat konstitusi yang terkesan “nementang” Irak.

Dalam Pasal 2 konstitusi KRG disebutkan bahwa KRG memintak pasal 140 dalam konstitusi Irak untuk mengebalikan daerah yang sebelumnya dianggap merupakan salah satu bagian dari KRG, wilayah yang dimaksud adalah Kirkuk. Selain itu, KRG juga menyombongkan diri dengan mengadakan perjanjian dengan pihak asing yang tertera dalam subjek non-Pasal 110 serta mempertahankan kekuasaan untuk menandatangani kesepakatan dengan pihak asing jika mendapat persetujuan dari Pemerintah Irak yang tertera dalam Pasal 110 konstitusi KRG.

#### **2.3.4 Sunni vs Syiah**

Pemerintah Irak mayoritas dikuasai oleh etnis Arab dengan agama Islam Syiah, sedangkan Kurdistan mayoritas menganut Islam Sunni. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam konstitusi Irak disebutkan bahwa undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Irak bersumber dari hukum Islam walau tidak menggunakan hukum islam secara langsung sebagai peraturan yang ada di dalam negara. Adanya perbedaan aliran yang dianut menjadikan keduanya sering berselisih dalam hal hukum yang merambah pada konflik sektarian dan politik.

Konflik Sunni-Syiah merupakan konflik yang rentan terjadi di negara-negara Arab. Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang merupakan golongan Syiah memecat beberapa pejabat yang bergolongan Sunni ketika tidak sejalan dengannya. Pada tanggal 17 Desember 2011 Perdana Menteri Irak Naouri al-Maliki memerintahkan untuk penangkapan Wakil Presiden Irak Tareeq Hashemi. Hal ini dilakukan karena menurut Perdana Menteri Nouri al-Maliki, Tareeq Hashemi yang dari kubu Sunni terlibat dalam aksi teroris di Irak. Selain itu Perdana Menteri Nouri al-Maliki juga memecat Deputy Perdana Menteri Irak Saleh Mutlak yang bergolongan Sunni dikarenakan Saleh Mutlak menyebut Perdana Menteri Nouri al-Maliki sebagai diktator yang berperilaku lebih buruk



dibanding dengan pemimpin Irak sebelumnya, Saddam Hussein (KOMPAS, 2011). Konflik Sunni-Syiah berujung pada konflik politik serta berhubungan dengan konflik yang terjadi diantara Pemerintah Irak dengan KRG.

### **2.3.5 Pasukan militer Irak vs Peshmerga**

Selain kompak dalam pemberantasan ISIS, Peshmerga dan pasukan militer Irak sempat berseteru karena saling memperebutkan wilayah Kirkuk yang merupakan wilayah kaya minyak. Pasca KRG mengadakan referendum kemerdekaan, Pemerintah Irak lebih ketat dan intens dalam pengawasannya terhadap daerah regional tersebut. Wilayah Kirkuk telah menjadi wilayah sengketa, seperti diketahui bahwa wilayah ini tidak masuk dalam Daerah Regional Kurdistan (KRG) namun mayoritas penduduknya adalah etnis Kurdi. Pada saat referendum kemerdekaan Kurdistan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017, wilayah Kirkuk termasuk salah satu wilayah yang juga mengadakan referendum, padahal wilayah tersebut tidak termasuk wilayah regional KRG. Hal ini menjadi awal mula perebutan wilayah Kirkuk oleh Pemerintah Irak dan KRG yang melibatkan pasukan militer masing-masing (VOA Indonesia, 2017d).

Operasi militer yang dilakukan oleh pasukan militer Irak untuk merebut kembali wilayah Kirkuk dari KRG mulai dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017. Irak sangat menentang ambisi KRG untuk menguasai wilayah Kirkuk, oleh karena itu Pemerintah Irak memiliki ambisi untuk menaklukkan wilayah tersebut dan merebutnya kembali dari KRG (Haryono, 2017). Pemerintah Irak ingin merebut kembali ladang minyak Kirkuk dan pangkalan udara yang telah diambil alih oleh Peshmerga pada tahun 2014 saat ISIS menguasai seluruh wilayah Irak utara dan sempat mengalahkan pasukan militer Irak (BBC Indonesia, 2017a).

### **BAB 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAK TERHADAP ETNIS KURDI DAN KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG)**

Etnis Kurdi di Irak mulai ingin memisahkan diri dan membentuk negara yang merdeka dimulai sejak runtuhnya Kerajaan Ottoman dan ketika Irak berada di bawah kolonial Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, etnis Kurdi lebih memprioritaskan untuk mendapatkan hak otonominya di Irak.

#### **3.1 Kebijakan Pemerintah Saddam Hussein**

Saddam Hussein merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia perpolitikan Irak dan dunia. Saddam Hussein lahir pada bulan April 1937, merupakan seorang muslim Sunni dari Tikrit. Karir perpolitikannya di mulai saat dirinya bergabung dengan partai Ba'ath (salah satu partai nasional di Irak) pada tahun 1957, dan merupakan salah satu anggota dari tim yang meluncurkan percobaan pembunuhan terhadap Qassem pada tahun 1959, namun aksi tersebut gagal. Setelah itu Saddam Hussein melarikan diri lalu kembali ke Irak pada tahun 1963 dan melibatkan diri dalam sebuah organisasi partai klandestin sampai kudeta pada tahun 1968 yang membawa partai Ba'ath dan dirinya menduduki kursi kekuasaan Irak (Rangwala, 2002:6).

Konflik Sunni-Syiah menjadi salah satu hal yang umum di negara-negara Arab, termasuk Irak. Pada rezim Saddam Hussein, yang merupakan Sunni, Syiah perlahan-lahan diperas keluar dari Partai Baath yang berkuasa saat itu dan menanggapi dengan membentuk organisasi mereka sendiri yang bertentangan dengan rezim tersebut (Ottaway & Kaysi, 2012:3).

Pada awal kepemimpinan Saddam Hussein dibentuklah Dewan Komando Revolusioner (*the Revolutionary Command Council/RCC*) menetapkan konstitusi baru yang bersifat sementara pada bulan November 1969 yang berisi bahwa Irak

merupakan “Republik Demokratik Rakyat Berdaulat” (*Sovereign People’s Democratic Republic*) dengan tujuan untuk menciptakan satu negara arab yang memiliki agama resminya islam, Bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara Irak, serta Bahasa Kurdi merupakan bahasa resmi di daerah Kurdistan Irak. Dalam konstitusi tersebut juga dijelaskan bahwa hak-hak Kurdi dan etnis minoritas lainnya diakui. Sistem ekonomi didasarkan pada perencanaan negara dalam konteks sistem sosialis dan kesatuan ekonomi Arab. Kepemilikan properti pribadi dijamin, selama tindakan ekonomi individu dilakukan secara legal serta kepemilikan pribadi dilindungi dari pengambilalihan kecuali untuk pertimbangan kepentingan umum dan hanya dengan kompensasi sama halnya dengan konstitusi tahun 1964 (Johnson, 2004:26).

Selama pemerintahan Saddam Hussein meningkatnya konflik militer serta meningkatnya serangan terhadap orang Kurdi (warga sipil), serangan udara dan pengusiran paksa warga Kurdi. Di mana pemerintah menerapkan kebijakan untuk memindahkan pemukiman Arab ke daerah Kurdi, terutama di daerah ladang minyak Kirkuk. Pada tanggal 11 Maret 1970 disepakati sebuah memorandum yang menetapkan penciptaan dari semua wilayah dengan mayoritas Kurdi di daerah otonom, terkait wilayah administrasi khusus dan pemerintah akan memberi lebih banyak pengakuan daripada yang telah dijanjikan pada identitas Kurdi yang terpisah, kompensasi atas kerusakan perang dan pengembalian warga yang telah diusir paksa. Namun memorandum tahun 1970 gagal. Ketika pemerintah secara unilateral menyusun undang-undang otonomi tahun 1974 yang tidak memenuhi harapan orang Kurdi, perselisihan berlanjut (Johnson, 2004:29-30; Rogg & Rimscha, 2007:827).

Selain itu, banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia selama masa rezim Saddam Hussein, di mana Pemerintah Irak secara rutin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya, serta adanya penganiayaan terhadap keluarga mereka. Sejumlah besar pelanggaran HAM dilakukan oleh polisi, yaitu pelaku kejahatan mendapat hukuman berupa mutilasi tubuh, penyiksaan, serta intimidasi. Para pendeta Syiah dan minoritas etnis Kurdi dan Turkoman mendapatkan penganiayaan secara regular (Rangwala, 2002:10).

Kemudian pada tahun 1980 Irak mulai memiliki senjata kimia dikarenakan Uni Soviet memindahkan bahan baku senjata kimia yang dimilikinya ke Irak. Sejak saat itu Irak mulai memproduksi persenjataan kimia secara mandiri dengan membeli persenjataan khusus dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pada tahun 1982 sebuah perusahaan di Jerman bernama *Karl Kolb of The City of Dreiech* bersedia menjadi penyedia alat-alat teknis kimia untuk Irak. Akhirnya pada tahun 1983 Irak dibawah kepemimpinan Saddam Hussein mulai menggunakan senjata kimia yang diproduksinya dalam perang Irak-Iran. Pada awalnya Irak menggunakan senjata kimia berupa *sulfur mustard* secara terbatas untuk mengalahkan pasukan militer Iran pada malam hari. kemudian pada tahun 1984 Irak mulai menggunakan senjata kimia untuk melawan Iran dengan menyerang Piran Shahr yang terletak disekitar kota Panjivon. Kejadian ini disebut oleh Iran sebagai kejahatan perang yang dilakukan Irak. Setelah itu Irak memutuskan untuk tidak menggunakan senjata kimia sementara waktu. Kemudian Irak menggunakan senjata kimia kembali untuk menyerang warganya sendiri yang biasa di sebut sebagai “Operasi Anfal” (*Iran Indonesian Radio*, 2015).

“Operasi Anfal” merupakan sebuah operasi militer Pemerintah Irak pada masa rezim Saddam Hussein yang dipimpin oleh keponakan Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Utara Partai Baath. Pemerintah menyebut operasi sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah Irak dalam upaya meredam pemberontakan yang dilakukan oleh gerilyawan Kurdi yang merebut daerah Anfal (BBC Indonesia, 2006). Pada tahun 1988 dalam operasi tersebut, jet tempur militer Irak menyerang perkampungan Halabaja, sebuah perkampungan dengan penduduk mayoritas etnis Kurdi, dengan menjatuhkan bom kimia yang mematikan. Akibat serangan tersebut menewaskan ribuan penduduk sipil, di mana iga perempat korbannya merupakan perempuan dan anak-anak. Akibat operasi ini diperkirakan ada 182.000 korban jiwa dari etnis Kurdi yang menghirup gas beracun dan terkena serangan bom. Selain itu, ada sekitar 4000 desa yang rusak akibat serangan ini (TEMPO, 2010).

Operasi Anfal mengerahkan 50 pesawat tempur yang masing-masing pesawat membawa empat bom kimia dan mendapat komando langsung dari

Saddam Hussein. Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1988 dan terjadilah tragedi pemboman di daerah Halabaja pada pukul dua siang yang menewaskan lebih dari 5000 warga sipil dan melukai lebih dari 10.000 orang (*Iran Indonesian Radio*, 2015) .

Sebagaimana telah diketahui bahwa etnis Kurdi merupakan etnis yang paling dibenci oleh Saddam Hussein. Hal ini terbukti dari kebijakan *ethnic cleansing* yang dilakukan oleh pemerintahan Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi. Kebijakan ini juga menjadi sorotan dunia. banyak kalangan yang menentang kebijakan tersebut. Karena adanya desakan dari masyarakat internasional pada tahun 1991 pemerintahan Saddam Hussein memberikan otonomi khusus terhadap etnis Kurdi (Hapsari, 2012). Saddam Hussein akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 30 Desember 2006. Eksekusi mati tersebut dilakukan atas dakwaan kepada Saddam Hussein berupa kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida yang dilakukannya.

Karena adanya genosida ini etnis Kurdi yang ada di Irak berada dibawah pengawasan PBB akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein terkait dengan kebijakannya. Genosida merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan suatu etnis (*ethnical cleansing*). Menurut Majelis Umum PBB kejahatan genosida tidak hanya berupa pemusnahan etnis namun juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), oleh karena itu kejahatan genosida mencakup dua hal yaitu “*ethnocide*” dan “*politicide*” (Turangan, 2011:5).

### **3.2 Kebijakan Pemerintah Irak Pasca Invasi Amerika Serikat**

Setelah serangan teroris 9/11, para pemimpin Amerika Serikat memutuskan untuk mengaktifkan undang-undang lama, Undang-Undang Pembebasan Irak tahun 1998, yang telah disahkan oleh kongres, sebagai sebuah langkah menuju sebuah invasi (Jawad, 2013:7). Pada tahun 2001 Saddam Hussein dan negaranya mendapat tuduhan dari pemerintahan George W. Bush sebagai dalang dari aksi 9/11 dengan memberikan kelompok teroris sebuah senjata kimia. Akhirnya pada bulan November 2002 Irak mempersilahkan PBB

untuk memeriksa negaranya. Penyelidikan PBB dipimpin oleh Hans Blix dan mengatakan bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak (Irawan, 2016:3). Namun penyelidikan PBB tidak membuat Amerika Serikat puas dan memutuskan untuk mengakhiri diplomasinya dengan Irak. Pada tanggal 17 Maret 2003, George W. Bush mengeluarkan ultimatum kepada Saddam Hussein untuk turun dari jabatan presiden dan meninggalkan Irak dalam kurun waktu 48 jam. Bila tidak dilakukan maka Saddam Hussein harus siap untuk berperang melawan Amerika Serikat (Firman, 2017b).

Saddam Hussein tidak menuruti ultimatum dari Presiden Amerika Serikat, maka invasi Amerika Serikat kepada Irak pun benar-benar terjadi, dimulai tanggal 20 Maret 2003. Invasi ini memiliki tujuan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dilakukan dengan mengerahkan sekitar 250.000 tentara Amerika Serikat. Pada tanggal 9 April 2003 rezim Saddam Hussein berhasil digulingkan. kehadiran pasukan Amerika Serikat terjadi selama delapan tahun (2003-2011), selama itu Irak menyelesaikan transisi dari kediktatoran rezim Saddam Hussein ke sistem politik yang lebih demokratis (Katzman & Humud, 2016:3). Akibat invasi Amerika Serikat di Irak ini, PBB memperkirakan ada sekitar 152.000 jiwa yang tewas dalam kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Maret 2003 hingga Juni 2006 (BBC Indonesia, 2013).

Invasi Amerika Serikat ke Irak tidak semata-mata untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein, tetapi lebih untuk memperkuat pengaruhnya di Kawasan Timur Tengah dan membangun pangkalan militer di Irak. Hal ini terbukti karena Amerika Serikat masih menduduki Irak hingga tahun 2011. Pangkalan militer Amerika Serikat di bangun di Irak karena dinilai sebagai tempat yang strategis dan untuk melindungi Israel. Alasan lain adalah karena cadangan minyak yang dimiliki oleh Irak berlimpah sehingga memudahkan Amerika Serikat dalam memasok minyak dan menguntungkan perusahaan minyak Amerika Serikat yang beroperasi di Irak (Wulandari, 2015:134-136).

### 3.2.1 TAL (Transtitional Administrative Law)

Selama masa transisi Amerika Serikat mengambil kendali dalam merancang sebuah undang-undang yang dikenal dengan TAL (*Transtitional Administrative Law*), menunjuk pemerintahan sementara Irak, serta menyusun peta pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2005 (Katzman & Humud, 2016:3).

Pada masa transisi ini orang Kurdi muncul sebagai pemain kunci. Di saat partai-partai Syiah masih harus beradaptasi setelah kembali dari perasingan yang lama, Sunni telah mendominasi Pemerintah Irak. Sementara itu Kurdi berhasil mempertahankan posisinya di jajaran pemerintahan pusat, aparat intelejen dan keamanan yang baru dibentuk (khususnya tentara). Amerika Serikat, Talabani dan Barzani mendapat beberapa keuntungan besar dalam negosiasi mengenai Undang-Undang Administratif Transisional (TAL) yang mulai berlaku pada bulan Maret 2004. Dalam pasal 11 TAL disebutkan bahwa Bahasa Kurdi menjadi salah satu Bahasa resmi di Irak dan Irak merupakan negara *bilingual* (memiliki dua bahasa resmi). Pasal 4 TAL menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Irak bersifat republikan, federal, demokratis, dan pluralistik, serta kekuasaan harus dibagi antara pemerintah federal dan daerah otonomi (*regional government*), gubernur, pemerintah kota, dan pemerintah daerah (Jawad, 2013; Rogg & Rimscha, 2007).

Para perancang TAL lebih berpihak kepada Kudi, hal ini terbukti dari tuntutan Kurdi yang disetujui oleh perancang TAL dan melemahkan pemerintah pusat. Serta perancang TAL lebih memfokuskan pada pelemahan posisi pemerintah pusat dan memperkuat provinsi dan entitas regional. “Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Dohuk, Erbil, dan Sulaimaniyah secara resmi diakui, dan memegang kendali atas kepolisian dan keamanan internal – sebuah keputusan dimana unit Peshmerga secara resmi menjadi bagian dari pasukan keamanan Irak. Pengakuan secara penuh ini kemudian dikonfirmasi dalam konstitusi, yang mulai berlaku setelah referendum publik 15 Oktober 2005 (Jawad, 2013; Rogg & Rimscha, 2007).

Sesuai dengan rencana, pemilu pertama pasca runtuhnya rezim Saddam Husein diadakan pada tanggal 30 Januari 2005 yang menghasilkan sebuah

parlemen transisi sebanyak 275 kursi yang kemudian dalam penulisan undang-undang baru diawasi oleh Amerika Serikat, mengadakan referendum publik mengenai sebuah konstitusi baru, dan puncaknya pengadaan pemilihan pemerintah secara penuh. Pemilu pertama ini menjadikan Jalal Talabani dari PUK (Patriotic Union Kurdistan) sebagai Presiden Irak dan Ibrahim al-Jafari dari Partai Da'wah sebagai Perdana Menteri Irak. Barulah pada tanggal 15 Desember 2005 diadakan pemilu untuk pemerintah jangka panjang (menjabat selama empat tahun). (Katzman & Humud, 2016:3-7).

Referendum kemerdekaan pertama kali dilakukan oleh orang Kurdi pada tahun 2005, dalam referendum tersebut ditentukan apakah orang Kurdi ingin wilayah Kurdistan tetap menjadi bagian dari Irak atau untuk menjadi independen dengan mendirikan negara yang terpisah dari Irak. Hampir dua juta orang (sekitar 98% peserta) memilih untuk kemerdekaan wilayah Kurdistan. Tetapi referendum tersebut tidak resmi karena adanya penyimpangan dalam pengadaan referendum tersebut, yaitu anak-anak diizinkan untuk memberikan suara mereka. Bagi Partai mayoritas (penguasa) di Irak referendum dipersilakan sejauh menunjukkan kepada mitra mereka di pemerintah pusat bahwa hasil referendum akan dilakukan jika skema federalisme gagal dilakukan. Beberapa hari setelah diadakannya referendum tersebut, Masoud Barzani menyatakan bahwa “sebuah negara Kurdi yang independen akan menjadi kenyataan di saat yang tepat”(Rogg & Rimscha, 2007:832-833).

Pada tahun 2007, Dinas Keamanan Negara (*al-amn al-'am*, atau *asayish* di Kurdi) telah dibubarkan di wilayah Irak lainnya kecuali di wilayah Kurdistan. Menurut laporan *Human Rights Watch*, *asayish* telah menahan ratusan tersangka tanpa diadili dan seringkali dilakukan selama bertahun-tahun, yang sebagian besar diduga disiksa dan diperlakukan sewenang-wenang (Rogg & Rimscha, 2007:833).

### 3.3 Kebijakan Pasca Pemilu 2010

Akhirnya pada tahun 2010 pasukan militer Amerika Serikat ditarik mundur sesuai dengan janji Presiden Barack Obama dalam kampanyenya pada



tahun 2008. Namun Pemerintah Amerika Serikat masih menyisakan sekitar 50.000 tentara guna mempersiapkan proses peralihan keamanan (BBC Indonesia, 2013).

Pemilu tahun 2010 diadakan pada tanggal 6 Maret. Pada pemilu ini terdapat lima koalisi, yaitu Koalisi Nasional Irak, Koalisi Negara Hukum, Gerakan Nasional Irak, Koalisi Persatuan Irak, dan Kubu Kurdi (M. A. Rahman, 2010). Pemilu ini diwarnai dengan kekerasan. Sebelum diadakannya pemilu, pengadilan mengizinkan para peserta yang sebelumnya merupakan bagian dari partai Baath (partai pengusung Saddam Husein) sebagai calon parlemen yang akan berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menyebabkan ketegangan di dalam politik Irak, selain itu Amerika Serikat juga mengutarakan kekhawatirannya terhadap hal tersebut karena di rasa akan menimbulkan ketegangan sektarian dan dapat mengganggu proses berjalannya pemilu (BBC Indonesia, 2010b). Ada sebanyak 6.200 calon yang memperebutkan 325 kursi di parlemen.

Selain ketegangan yang terjadi sebelum pemilu, pada hari-H pemilihan dilangsungkan terdapat setidaknya dua puluh ledakan mortar sporadis di tempat pemilihan. Hal ini mengakibatkan setidaknya dua puluh empat orang tewas. Akibat serangan ini dua gedung apartemen di Baghdad hancur. Jumlah korban di Baghdad mencapai dua belas orang tewas di area pemukiman dan menyusul serangan berikutnya yang menewaskan lima orang. Di luar Baghdad juga terjadi ledakan tetapi tidak di area pemilihan yang menewaskan tujuh orang. Sebelum pemilu berlangsung kelompok militan Islam berjanji akan mengacaukan proses pemilihan parlemen dengan berbagai serangan bahkan mereka menyebarkan selebaran agar tidak mendatangi tempat pemilihan (BBC Indonesia, 2010a).

Perhitungan suara dalam pemilu tahun 2010 dimenangkan oleh Iyad Allawi dengan selisih tipis dari rivalnya yaitu perdana menteri yang menjabat saat itu, Nouri al-Maliki. Keduanya hanya memiliki selisih dua kursi parlemen, Iyad Allawi memperoleh 91 kursi dari total 325 kursi, sedangkan Nouri al-Maliki mendapat 89 kursi. Hal ini menimbulkan protes dari kubu Nouri al-Maliki yang kemudian dilakukan perhitungan ulang secara manual (Detiknews, 2010). Hingga akhirnya Nouri al-Maliki berhasil memenangkan pemilu dan menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya.

Mahkamah Konstitusi Irak memutuskan bahwa koalisi yang dipimpin oleh Nouri al-Maliki memenangkan pemilu dan dapat membentuk pemerintahan baru. Kemudian terjadi perundingan di Erbil, hal ini dilakukan karena Koalisi Irak tidak dapat menerima keputusan Mahkamah Konstitusi Irak. Dalam perundingan tersebut diambillah jalan tengah di mana kursi perdana menteri tetap diisi oleh Nouri al-Maliki kemudian Iyad Alawi menduduki kursi Ketua Dewan Kebijakan Strategis yang akan dibentuk oleh pemerintahan Nouri al-Maliki. Selain itu Tareeq al-Hashemi mendapat jatah kursi Wakil Presiden dan Saleh Mutlak mendapat jatah kursi Wakil Perdana Menteri Irak. Namun saat Nouri al-Maliki telah menduduki kursi Perdana Menteri kesepakatan di Erbil tidak dilaksanakan. Tareeq al-Hashemi tetap menjadi Wakil Presiden Irak sebelum Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki memerintahkan penangkapannya dan Saleh Mutlak hanya menduduki jabatan Deputy Perdana Menteri dan juga berujung pemecatan (KOMPAS, 2011).

Akhirnya pada tahun 2011 Presiden Barack Obama menyatakan bahwa perang di Irak telah berakhir dan akan menarik seluruh tentara Amerika Serikat yang ada di Irak pada akhir tahun 2011 (DW, 2011). Pasca kepundudukan pasukan militer Amerika Serikat di Irak, Irak menjadi negara yang diperebutkan oleh kelompok sektarian (Sunni, Syiah dan Kurdi) walaupun dalam praktek politiknya Irak sering menyerukan tentang persatuan negara-bangsa. Selain konflik sektarian, Irak juga harus menghadapi kelompok militan ISIS (Muhaimin, 2016).

### **3.3.1 Kebijakan Sengketa Minyak di Kirkuk**

Pada tahun 2012 Irak dihadapkan oleh konflik internal antara Pemerintah Irak dengan KRG mengenai wilayah Kirkuk yang memiliki sumber minyak terbesar di Irak. Sengketa tentang wilayah ini mulai merebak pada tahun 2003 di mana Irak merupakan negara dengan penghasilan terbesar negaranya dari hasil minyak, yaitu sebesar 95%. Awal mula ditemukannya ladang minyak di Kirkuk adalah pada tahun 1927 oleh Perusahaan Minyak Irak (*Iraq Petroleum Company*) dan mengatakan bahwa Irak merupakan negara dengan penghasil minyak utama.

Hingga tahun 2004 eksplorasi minyak masih sangat terbatas. Barulah setelah invasi Amerika Serikat ke Irak sumber minyak yang ada di Kirkuk mulai dieksplorasi oleh sejumlah perusahaan independen. Kementerian Sumber Daya Alam KRG yang baru terbentuk pada tahun 2006 dengan Menteri Sumber Daya Alamnya Ashti Hawrami membuat sebuah kebijakan tentang eksplorasi minyak kepada para investor dan perusahaan minyak yaitu ramah-investor, mempromosikan kontrak pembagian produksi, dan memutuskan alokasi blok kepada perusahaan. Kepemimpinannya telah mendorong sektor minyak yang ada di daerah Kirkuk berkembang pesat, namun karena gaya konfrontasinya dengan Pemerintah Irak menjadi suatu hambatan untuk penyelesaian sengketa yang ada di Kirkuk (Mills, 2016:7-8).

Menteri Sumber Daya Alam KRG merupakan Menteri yang mengatur tentang perminyakan yang ada di daerah regional. Untuk mencapai prestasi politik yang signifikan, beberapa upaya dilakukan untuk menarik investor asing ke wilayah Kurdistan dan memberikan perhatian khusus terhadap kekayaan minyak yang ada di kawasan ini. Pada bulan Agustus 2007, Menteri Sumber Daya Alam KRG mengadopsi undang-undang minyak dan gas. Ada rencana untuk menaikkan *output* dari hanya beberapa ribu barel per hari menjadi satu juta barel per hari dalam waktu sekitar lima tahun. Langkah yang diambil ini sangat kontroversial. Hal ini tidak sejalan dengan undang-undang Pemerintah Irak yang menetapkan pedoman umum untuk pemerintah pusat dan daerah terkait dengan sektor minyak dan investasi asing. Ada sebuah undang-undang yang diproyeksikan untuk menentukan tingkat otonomi pemerintah daerah sebelum mencapai parlemen. Menteri Perminyakan Irak Hussein Shahrastani berulang kali mengatakan bahwa semua kesepakatan yang ditandatangani oleh KRG sejak Februari 2007 adalah ilegal. Kedua belah pihak mengacu pada pasal-pasal konstitusi yang relevan, yang sebenarnya bertentangan dan menyisakan ruang untuk pengkajian lebih lanjut.

Meskipun adanya perbedaan hukum yang mendasar antara KRG dan Pemerintah Irak, kemajuan dalam produksi dan kesadaran akan keterlambatan dalam mengeksplorasi minyak menyebabkan masuknya perusahaan minyak secara cepat, dengan beberapa perusahaan minyak seperti OMV, MOL, Korporasi

Minyak Nasional Korea (*Korea National Oil Corporation*), *India's Reliance Industries*, dan *Alfa-Access-Renova* (mitra Rusia di TNK-BP) yang mana mereka semua menandatangani kerja sama minyak di Kirkuk pada akhir tahun 2007. Lalu pada tahun 2011 KRG memiliki posisi yang sangat kuat di Kirkuk, hal ini menyebabkan perselisihannya dengan Pemerintah Irak semakin meningkat. KRG menandatangani PSC (*Production Sharing Contract*) dengan ExxonMobil untuk mengeksplorasi enam blok yang ada di Kirkuk. Hingga awal bulan Desember 2012 sebagian besar wilayah eksplorasi minyak di Kirkuk dikendalikan oleh KRG (Mills, 2016:10-11).

Mulai pada bulan Desember 2013, KRG melakukan ekspor minyak secara langsung kepada Turki tanpa perantara Pemerintah Irak melalui pipa. Ekspor melalui pipa dilakukan karena sebelumnya KRG mengeksport minyak melalui truk karena ekspor melalui pipa dikendalikan oleh Pemerintah Irak. Hingga pada bulan November 2013 pemerintah Irak memberlakukan sanksi terhadap orang Kurdi yang melakukan transaksi minyak. Selain melakukan ekspor minyak dengan Turki, KRG juga menjalin kerjasama dengan Israel. Karena Irak tidak menjalin diplomasi dengan Israel Pemerintah Irak tidak dapat memberlakukan sanksi (Mills, 2016:12).

Puncak ketegangan antara Pemerintah Irak dengan KRG adalah di tahun 2014. Hal ini dikarenakan Pemerintah Irak menghentikan aliran dana untuk KRG. KRG berhak atas 17% dari keseluruhan anggaran yang dimiliki Irak. KRG mengatakan bahwa mereka membutuhkan aliran dana yang stabil untuk membayar tagihan mereka. KRG seharusnya menerima dana dari Pemerintah Irak sebesar satu miliar dollar hingga satu koma dua miliar dolar, namun Pemerintah Irak hanya mengalokasikan lima ratus juta dolar pada bulan Februari 2014 dan benar-benar menghentikan aliran dana terhadap KRG pada bulan Maret 2014 (Zhdannikov, 2015). Setelah aliran dana dari Irak terhenti hal ini menyebabkan krisis anggaran dan ekonomi di KRG. Namun hingga akhir 2015 jumlah penjualan minyak oleh KRG adalah sebesar 500.000 barel per hari (Reuters, 2015).

Pemerintah Irak berupaya untuk membendung ekspor yang dilakukan oleh KRG, hal ini dilakukan karena Pemerintah Irak merasa wilayah Kirkuk bukannya

bagian dari KRG namun milik Pemerintah Federal Irak. Pemerintah Irak mengajukan gugatan terhadap perusahaan pelayaran Yunani, *Marine Management Services* karena perannya dalam ekspor yang dilakukan oleh KRG pada tahun 2015 (Zhdannikov, 2015).

### 3.4 Kebijakan Pemerintah Pasca Pemilu 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014. Pemilu ini merupakan pemilu yang diadakan ketiga kali setelah invasi Amerika Serikat dan runtuhnya rezim Saddam Hussein. Pemilu tahun 2014 diadakan di delapan belas provinsi dengan 48.796 pos pemungutan suara yang didirikan di 8.083 pusat pemungutan suara untuk 21.503.875 orang pemilih. Adapun warga negara Irak yang berada di luar negeri diberi kesempatan untuk memberikan suaranya dengan didirikan tempat pemungutan suara di sembilan belas negara. Pemilu diadakan untuk memilih parlemen sebanyak 328 kursi dengan total kandidat 9.031, jumlah calon perempuan adalah 2.607 dan jumlah calon laki-laki adalah 6.424. Ketentuan dalam pemilu kali ini adalah delapan kursi parlemen diperuntukkan bagi kaum minoritas di bawah kuota etnis dan agama, pembagiannya adalah orang Kirsten mendapat jatah lima kursi (setiap kursi mewakili Kirkuk, Mosul, Baghdad, Dahuk dan Erbil), untuk Yazidis dan Shabaks memiliki jatah kursi di Mosul, serta orang Mandeam Sabaen memiliki jatah satu kursi di Baghdad (Duman, 2014:12-17).

Adanya serangan bom menjadi perhatian masyarakat internasional karena hal ini juga menyangkut soal keamanan. Hal ini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena pada awal tahun 2014 setidaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sektarian di Irak telah menewaskan 1.700 warga sipil. Selain itu menjelang pemilu yang diadakan pada tanggal 30 April tersebut kelompok afiliasi Al-Qaeda melakukan aksi bom bunuh diri dan menewaskan dua puluh lima orang Kurdi. Kemudian sehari sebelum dilaksanakannya pemilu, yaitu tanggal 29 April bom pasar di sebelah timur laut Baghdad Meletus dan memakan 33 orang (BBC Indonesia, 2014b).

Pada hari dilaksanakannya pemilu, 30 April 2014, merupakan pemilu yang dilaksanakan ditengah operasi keamanan yang dilakukan secara besar-besaran

oleh Pemerintah Irak terkait dengan kekerasan sektarian dan merupakan kekerasan sektarian yang terburuk selama beberapa tahun terakhir. Konflik sektarian merupakan konflik tentang suatu kebenaran ajaran agama maupun status kepemimpinan dalam agama tersebut, hal ini biasanya terjadi antar komunitas dalam suatu agama (Ali-fauzi, Alam, & Panggabean, 2009:9). Konflik sektarian sudah terjadi sejak masa *khulafa ur rosyiddin* di mana pada saat itu Syi'ah, yang "mentasbihkan" Ali bin Abi Thalib sebagai Nabi dan Rosul terakhir, mulai berkonflik dengan Sunni, muslim yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Setelah itu, Syiah mulai memiliki basis kekuatan di dataran Persia dengan melanjutkan perselisihan yang dilakukannya dengan Sunni. Adapun pihak Kurdi yang masuk dalam lingkaran konflik sektarian yang ada di Irak baru mulai muncul ketika wilayah konflik antara Syi'ah-Sunni mulai meluas di daerah Kurdi (Prasaja, 2011).

Konflik sektarian yang terjadi di Irak mulai berkembang pada tahun 2005. Namun mulai berkembang secara drastis pasca penghancuran tempat suci umat Syiah pada bulan Februari 2006 (BBC Indonesia, 2013). Hal ini dikarenakan pada masa rezim Saddam Hussein ketiga kubu dalam konflik sektarian ini tidak memiliki daya untuk berkonflik (Prasaja, 2011). Pada tahun 2006 konflik sektarian berkecamuk hebat, adanya bentrok antara Sunni dan Syiah serta faksi-faksi Kurdi yang memakan ratusan korban jiwa dan beberapa menjadi pengungsi. Konflik sektarian ini tidak lagi menyinggung masalah agama, tetapi lebih kepada kepentingan politik dan kekuasaan.

Pemilu akhirnya dimenangkan oleh koalisi Nouri al-Maliki, namun partai koalisi menentang jabatan perdana menteri diberikan kepada Nouri al-Maliki untuk ketiga kalinya karena mereka menganggap kekerasan sektarian yang menewaskan total 3.500 orang pada tahun 2014 merupakan tanggung jawab Nouri al-Maliki dan Nouri dituduh berusaha merekayasa kekuasaan (BBC Indonesia, 2014a). Akhirnya partai koalisi menunjuk Haider al-Abadi sebagai Perdana Menteri Irak. Pada saat itu Haider al-Abadi menjabat sebagai Wakil Ketua Parlemen. Kemudian ditunjuk oleh Presiden Irak Fouad Massoum untuk membentuk suatu pemerintah baru setelah koalisi partainya menang (VOA Indonesia, 2014).

Pasca terpilihnya Haider al-Abadi sebagai Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di Irak, salah satunya adalah konflik internal antara Sunni dan Syi'ah. Konflik sektarian yang ada di Irak masih terus berlanjut walau pemilu telah selesai dilakukan. Selain itu, daerah wilayah Sunni saat itu dikuasai oleh ISIS dan sebagian lain berada di bawah kendali KRG yang merupakan pemerintah otonomi yang berada di wilayah Kurdistan Irak. Masyarakat Syi'ah tetap mendukung Pemerintah Irak meski keadaan pemerintah pusat sedang melemah (Pars Today, 2016b).

Pada tanggal 3 Juli 2014 Perdana Menteri KRG Massoud Barzani meminta parlemen KRG untuk menetapkan tanggal referendum kemerdekaan Kurdistan dari Irak. Referendum Kurdistan telah tertera dalam konstitusi Irak pasal 40 namun referendum tersebut belum pernah terjadi hingga Juli 2014. Keinginan referendum diungkapkan oleh Massoud Barzani karena ketidakstabilan yang terjadi di Irak, hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Irak yaitu Nouri al-Maliki. Massoud Barzani mengatakan pula bahwa sebelum Nouri al-Maliki melepas jabatannya sebagai Perdana Menteri Irak KRG telah memperingatkannya namun tidak ada respon, maka inilah langkah yang harus diambil oleh KRG (KOMPAS, 2014).

Setelah Haider al-Abadi menduduki kursi Perdana Menteri, Pemerintah Irak dan KRG menandatangani kesepakatan tentang minyak yang ada di wilayah Kirkuk yaitu KRG akan mentransfer rata-rata 500.000 barel per hari kepada perusahaan minyak negara Irak, SOMO, selama tahun 2015 dan menerima 17% anggaran dana Irak per bulan (Zhdannikov, 2015).

Pemerintahan Haider al-Abadi juga harus dihadapkan dengan ISIS yang mulai memasuki daerah Irak dan ingin mengausai beberapa titik daerah yang ada di Irak. ISIS mengklaim bahwa daerah Mosul merupakan “daerahnya” dalam melaksanakan pemerintahan yang berbasis *khilafah*.

Belum selesai masalah yang Irak hadapi mengenai ISIS dan konflik sektarian, pada tanggal 25 September 2017 KRG mengadakan Referendum Kemerdekaan.

### 3.5 Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak Tahun 2017

Pada tanggal 7 Juni 2017 Presiden KRG Mahmoud Barzani mengumumkan melalui akun *twitter*nya bahwa referendum kemerdekaan akan diadakan pada tanggal 25 September 2017 (A. Rahman, 2017). Keputusan ini diumumkan setelah Mahmoud Barzani mengadakan pertemuan dengan seluruh wakil partai politik yang ada di wilayah Kurdistan Irak. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang isu-isu penting termasuk situasi politik ekonomi yang ada pada saat tersebut, pemilihan parlemen yang akan dilaksanakan akhir tahun, serta rencana Kurdistan Irak mengadakan referendum kemerdekaan (*krg.org*, 2017). Menurut Kurdistan Irak, inilah momen yang tepat untuk memisahkan diri dari Irak, salah satu alasan yang dijabarkan oleh Hamin Hawrami adanya penurunan hubungan yang terjalin di antara Pemerintah Irak dengan KRG (A. Rahman, 2017). Beberapa jam setelah diumumkannya tanggal pelaksanaan referendum, Amerika Serikat secara langsung menyatakan kepada KRG untuk membatalkan keputusan yang telah mereka ambil. Selain itu, Amerika Serikat bersedia menjamin fasilitas untuk perundingan antara Pemerintah Irak dan KRG. Alasan yang dikemukakan Amerika Serikat terkait penolakannya atas adanya referendum ini adalah referendum hanya akan mengganggu upaya memberantasan ISIS dan mengembalikan stabilitas kawasan yang telah terbebas dari ISIS (Firman, 2017a).

Sebelumnya Pemerintah Irak tidak memiliki banyak masalah ketika Kurdistan Irak ingin memisahkan diri dari Irak hingga parlemen Irak secara terang-terangan mengancam referendum kemerdekaan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 25 September 2017 dalam sidang parlemen yang diadakan pada tanggal 13 September 2017. Menurut parlemen Irak, dengan diadakannya referendum maka akan mengancam integritas Irak serta mereka berpendapat bahwa Pemerintah Irak harus mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesatuan nasional. Menurut salah satu anggota parlemen Irak, Mahmoud al-mashhadani, sidang parlemen yang diadakan hari itu diboikot oleh seluruh etnis Kurdi yang ada di Irak. Selain kecaman dari parlemen Irak, rencana diadakannya referendum kemerdekaan oleh Kurdistan Irak juga mendapat kecaman dari beberapa negara tetangga yaitu Turki, Iran, dan Suriah yang juga merupakan negara-negara dengan



penduduk beretnis Kurdi dan ditakutkan gerakan separatis yang dilakukan ini akan melebar hingga ke negara mereka (VOA Indonesia, 2017b).

Setelah parlemen Irak mengecam diadakannya referendum, kali ini Perdana Menteri Irak Haider al Abadi menyatakan bahwa dengan diadakannya referendum, maka warga Kurdi sedang menyulut api kepada Pemerintah Irak (Firman, 2017a). Abadi mengatakan bahwa pemungutan suara yang dilakukan pada saat referendum tidaklah konstitusional dan mengancam perdamaian. Abadi juga mengatakan bahwa Pemerintah Irak akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara (BBC Indonesia, 2017d).

Walau mendapat pertentangan dari dunia internasional, Barzani tetap pada pendiriannya untuk mengadakan referendum pada tanggal yang telah ditetapkannya. Hal ini juga menyangkut harga diri KRG dan semangat nasionalisme warga Kurdi yang berkobar saat berperang melawan ISIS (Firman, 2017a).

Pada tanggal 11 September 2017, Masoud Barzani mengatakan kepada BBC bahwa setelah Kurdistan Irak mengadakan referendum kemerdekaan, mereka akan mulai berdialog dan berdiskusi dengan Pemerintah Irak untuk mencapai kesepakatan tentang batas wilayah kedua belah pihak dan Sumber Daya Alam yang berupa air dan minyak (BBC Indonesia, 2017c).

Sehari sebelum diadakannya referendum, warga Kurdi berbondong-bondong mengibarkan bendera KRG di beberapa titik di daerah Erbil yang dikontrol langsung oleh KRG (Hasan, 2017). Selain itu, Pemerintah Irak juga mulai menutup jalur udara yang berada di wilayah KRG.

Akhirnya referendum kemerdekaan benar-benar dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017. Di mana setelah referendum diselenggarakan akan mengubah status Kurdistan Irak yang semula *proto state* (daerah otonom) menjadi *sovereign state* atau negara berdaulat. Pemungutan suara dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat. Dalam pemungutan suara referendum ini daerah yurisdiksi KRG yaitu Erbil, Sulaimaniyah dan Dahuk turut serta dan Kirkuk yang menjadi daerah sengketa Pemerintah Irak dengan KRG juga

berpartisipasi dalam pemungutan suara (Hasan, 2017). Terdapat sekitar 2.065 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan memfasilitasi kurang lebih 5,6 juta orang yang berhak memilih dan berpartisipasi dalam referendum ini. TPS ini disebar di daerah-daerah yang menjadi kekuasaan etnis Kurdi serta di daerah KRG sendiri (Sindonews, 2017). KRG mengatakan bahwa referendum yang diadakan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mendapatkan kedaulatan dan menjadi negara yang merdeka. Referendum yang diadakan oleh warga Kurdi ini dianggap “tidak sah” oleh Kementerian Luar Negeri Turki (Sofwan, 2017).

Sehari setelah diadakannya referendum, Pemerintah Irak secara terbuka menolak untuk berdialog dengan KRG. Hal ini dikarenakan menurut Pemerintah Irak referendum yang dilakukan oleh warga Kurdi tidak sesuai dengan konstitusi dengan begitu hasil dari referendum juga tidak sah. Sebagaimana menurut hitung cepat yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 90% warga Kurdi memilih “ya” yang artinya mereka ingin melepaskan diri dari Irak dan membentuk negara baru (Hanna Azrya Samosir, 2017).

## BAB 5. KESIMPULAN

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak untuk mengatasi rancangan kemerdekaan yang akan dilaksanakan setelah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 adalah dengan menggunakan *stick and carrot approach*. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak menggunakan pendekatan *stick* dengan tiga tekanan, yaitu tekanan ekonomi, tekanan politik, dan tekanan psikologis. Dalam tekanan ekonomi, Pemerintah Irak mengembargo jalur penerbangan internasional di dua bandara internasional yang ada di KRG yaitu di Erbil dan Sulaimaniyah. Selain itu, Pemerintah Irak juga menutup akses bagi bank yang ada di KRG serta mengambil alih ladang minyak yang ada di Kirkuk. Ketiga kebijakan tersebut mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian KRG. Dalam tekanan politik, Pemerintah Irak mengerahkan pasukan militernya untuk menguasai daerah Kirkuk yang selama ini di klaim oleh KRG sebagai salah satu daerah otonomi mereka. Turki sebagai negara yang menjalin kerjasama dengan KRG dalam transaksi penjualan minyaknya juga menghentikan impor yang dilakukannya selama ini dengan KRG sebagai salah satu bentuk Turki yang menentang hasil referendum. Selain itu, Iran mengembargo ekspor dan impor produk bahan bakar dari KRG. Serta dalam tekanan psikologis, Pemerintah Irak mengerahkan pasukan militernya ke daerah perbatasan untuk menekan KRG agar tidak memisahkan diri. Pemerintah Irak juga bekerjasama dengan Iran untuk melakukan latihan militer di daerah perbatasan.

Pada tanggal 20 November 2017, Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Irak memutuskan bahwa referendum kemerdekaan Kurdistan yang diadakan pada tanggal 25 September 2017 tidak konstitusional dan hasilnya tidak berlaku lagi. Konflik ini berakhir dengan hadiah

atau *carrot* dari Pemerintah Irak melalui pertemuan dan dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Irak dengan KRG pada tanggal 25 Januari 2018. Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa konflik yang terjadi diantara keduanya harus diselesaikan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Bukti nyata dari hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Irak adalah pencabutan embargo penerbangan yang sebelumnya dilaksanakan setelah referendum dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Irak juga menjamin gaji pegawai negeri yang ada di KRG terutama untuk pasukan militer Peshmerga yang telah banyak membantu pasukan militer Irak dalam meberantas ISIS. Pemerintah Irak juga menjamin anggaran yang masuk untuk KRG sebanyak 17% dari total anggaran Pemerintah Irak akan disalurkan sebagaimana mestinya dan tanpa ada hambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Black, Henry Campbell, dan Joseph R. Nolan. 1990. *Black's law dictionary* (6th Ed.). St. Paul, Minn: West Publishing.
- Ali-fauzi, I., Alam, R. H., & Panggabean, S. R. 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*. Jakarta: Paramadina Press.
- Chernoff, F. 2007. *Theory and Metatheory in International Relations Concepts and Contending Accounts*. New York: Palgrave Macmillan.
- Irawati, Erna, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI. Lembaga Administrasi Negara.
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Rangwala, G. 2002. *Iraq and the West: The Political of Confrontation*. (F. Preiss, Ed.), *Understanding Global Issues*. Cheltenham: Understanding Global Issues Limited.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Diunduh dari [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf)
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gorontalo: PENERBIT PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS.
- Tripp, C. 2000. *A History of Iraq. The Press Syndicate Of The University Of Cambridge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yildiz, Kerim. 2005. *The Kurds in Syria : the forgotten people* (1. publ. ed.). London: Pluto Press.

**Jurnal dan Report**

- Akçay, E. Y., Kanat, S., & Kelimeler, A. 2017. Carrot and Stick Approach in International Relations: an Evaluation Throughtout Turkey'S Accession Negotiations With the European Union. *Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences*, 44(29), 29415–435. Diunduh dari <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLr40SeqLU4xNvgOLCmr1CeprFSs6y4SrOWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnr0u0qrJPuePfgeyx9Yvf5ucA&T=P&P=AN&S=R&D=asn&K=127157563>
- Andreoni, J., Harbaugh, W., & Vesterlund, L. 2003. The carrot or the stick: reward, punishment and cooperation. *The American Economic Review*, 93(3), 893–902. Diunduh dari <https://doi.org/10.1257/000282803322157142>.
- Arikanli, Z. 2010. British legacy and evolution of Kurdish nationalism in Iraq (1918-1926): What significance the “Mosul Question”?. *Turkish Journal of International Relations*, 9(4), hal. 91–132.
- Duman, B. 2014. The 2014 Elections , Isis Operations And The Future Of Iraq. *TURKEY ORSAM REPORT No. 190*.
- Elphinston, W. G. (1946). "The Kurdish Question". *Journal of International Affairs. Royal Institute of International Affairs*. 22 (1): 91–103.
- Ganggas Danisworo, T., Cahyo Utomo, T., & Astuti, P. 2013. Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Gorgas, J. T. 2009) The Territory Margins of The Mandatory Syria: The Autonomist Movement in Upper Jazira, Paradoxs And Ambiguities of an Uncompleted “National” Integration, 1936-1939. *Revue Des Mondes Musulmans et de La Méditerranée*, 126.
- Hapsari, R. D. 2012. Ancaman Gerakan Etnonasionalisme Kurdi di Perbatasan Irak Utara terhadap Integrasi Nasional Turki. *Global & Strategis*, (1). 115–134.
- His Majesty's Stationery Office. 1923. Treaty of Peace with Turkey Lausanne. *Carnegie Endowment for International Peace*. Diunduh dari <https://doi.org/10.1017/S0032247400047586>.
- Jawad, S. N. 2013. The Iraqi Constitution: Structural Flaws And Political Implications. *LSE Middle East Centre Paper Series*, (1). Diunduh dari <http://eprints.lse.ac.uk/54927/>.
- Johnson, A. 2004. Iraq: legal history and traditions. *The Law Library of Congress*, 6462(June), 31. Diunduh dari <http://www.law.gov>.

- Katzman, K., & Humud, C. E. 2016. Iraq: Politics and Governance Specialist in Middle Eastern Affairs Analyst in Middle Eastern and African Affairs. *CSR Report*. Diunduh dari <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf>.
- Mills, R. 2016. Under the Mountains: Kurdish Oil and Regional Politics. *The Oxford Institute for Energy Studies*, (January), 7.
- Ottaway, M., & Kaysi, D. 2012. The state of Iraq. *The Carnegie Papers*, (February), 1–19.
- Rijal, N. K. 2015. Eksistensi dan Perkembangan ISIS : Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang*, 45–60. diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/99666-ID-eksistensi-dan-perkembangan-isis-dari-ir.pdf>.
- Rogg, I., & Rimscha, H. 2007. The Kurds as parties to and victims of conflicts in Iraq. *International Review of the Red Cross*, 89(868), 823–842. Diunduh dari <https://doi.org/10.1017/S1816383108000143>.
- Saeed, M. K. A., & O’Sullivan, C. 2006. Iraq between two Occupations Observations on Iraq and The Great Powers (1933-2003). *International Relations and Security Network*.
- Sahide, A. 2013. Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 139–145. Diunduh dari <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0035.139-145>.
- Torjman, S. 2005. What is Policy?. *Caledon Insitute of Social Policy*, (September), 1–20.
- Wulandari, D. A. 2015. Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 1, 132–140.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Jalil, H. M. 2017. The British Administration Of South Kurdistan And Local Responses, 1918-1932. *Disertasi*. Leicester: Doctor of Philosophy at University of Leicester.
- Mizan, A. K. 2015. Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi Khusus Di Irak (1920 – 1991). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah.
- Nuzulian, U. 2008. Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi: Studi Kasus Setelah Perjanjian Sevres Tahun 1920. *Tesis*. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Turangan, D. D. 2011. Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum

Internasional dan Hukum Nasional .*Skripsi*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

### Internet

ABC News. 2006. *List of Saddam's Crimes Is Long*. <http://abcnews.go.com/WNT/IraqCoverage/story?id=2761722&page=1> diakses pada tanggal 8 November 2017.

Alhasany, M. 2018. *Suku Kurdi, Tunggangan Amerika Serikat di turki, Iran, Irak, dan Suriah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/empuratu/5a588dcedcad5b5962476be2/suku-kurdi-tunggangan-amerika-serikat-di-turki-iran-irak-dan-suriah> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Aminuddin, C. 2017. *Referendum Kurdi Irak, Amerika Serikat dan PBB Kecewa*. TEMPO. <https://dunia.tempo.co/read/1019814/referendum-kurdi-irak-amerika-serikat-dan-pbb-kecewa> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Ant. 2017. *Referendum Kurdi Usai, Dewan Khusus Bantu Pulihkan Hubungan dengan Baghdad*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/10/02/18/1786978/referendum-kurdi-usai-dewan-khusus-bantu-pulihkan-hubungan-dengan-baghdad> diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

Antaraneews. 2017a. *Irak Balas Referendum Kemerdekaan Kurdi dengan Penghentian Penjualan Dolar*. <http://www.antaraneews.com/berita/656331/irak-balas-referendum-kemerdekaan-kurdi-dengan-penghentian-penjualan-dolar> diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

Antaraneews. 2017b. *Mesir Sampaikan Keprihatinan Mendalam Mengenai Referendum Kurdistan Irak*. [http://www.antaraneews.com/berita/654953/mesir-sampaikan-keprihatinan-mendalam-mengenai-referendum-kurdistan-irak?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/654953/mesir-sampaikan-keprihatinan-mendalam-mengenai-referendum-kurdistan-irak?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Antaraneews. 2017c. *Referendum Kurdistan, EgyptAir Bekukan Penerbangan Ke Erbil, Irak*. <http://www.antaraneews.com/berita/655165/referendum-kurdistan-egyptair-bekukan-penerbangan-ke-erbil-irak> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Arman, A. 2017. *Penerbangan ke Kurdi Ditutup, Warga Asing Berbondong Keluar*. Metrotvnews. <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/9K5jvMPN-penerbangan-ke-kurdi-ditutup-warga-asing-berbondong-keluar> diakses pada tanggal 31 Juli



2018.

BBC. 2017a. *Iraq Country Profile*. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542954> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

BBC. 2017b. *Iraqi Kurdistan referendum: Kurds offer to freeze independence*. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41744376> diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

BBC Indonesia. 2006. *Genosida atas Warga Kurdi*. [http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2006/04/060405\\_saddamkurdi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2006/04/060405_saddamkurdi.shtml) diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

BBC Indonesia. 2010a. *Pemilu Irak Diwarnai Kekerasan*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100307\\_iraquelection](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100307_iraquelection) diakses pada tanggal 21 Maret 2018.

BBC Indonesia. 2010b. *Rencana Pemilu Irak Tidak Menentu*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100204\\_iraquelection](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100204_iraquelection) diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

BBC Indonesia. 2013. *Perang Irak dalam Angka*. [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2013/02/130216\\_irak\\_statistik](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130216_irak_statistik) diakses pada tanggal 2 April 2018.

BBC Indonesia. 2014a. *Aliansi PM Irak Kuasai Kursi Terbanyak Parlemen Irak*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140519\\_irak\\_miliki](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140519_irak_miliki) diakses pada tanggal 15 Maret 2018

BBC Indonesia. 2014b. *Kekerasan Intai Pemilu Irak*. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140430\\_pemilu\\_irak](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140430_pemilu_irak) diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

BBC Indonesia. 2017a. *Bentrokan antara pasukan Irak dan Kurdi terjadi di Kirkuk*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41632875> diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

BBC Indonesia. 2017b. *Irak: 'Perang Melawan ISIS Telah Berakhir'*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42297488> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

BBC Indonesia. 2017c. *Kurdi Irak ancam "membuat perbatasan sendiri" dan mendirikan negara merdeka*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41223291> diakses pada tanggal 2 Juni 2018.

BBC Indonesia. 2017d. *Referendum kemerdekaan Kurdi Irak berlangsung kendati Irak menentang*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41384422> diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

- Christiastuti, N. 2017. *Dikalahkan Pasukan Irak, ISIS Kuasai Sebuah Desa Dekat Mosul*. Detiknews. <https://news.detik.com/internasional/d-3556019/dikalahkan-pasukan-irak-isis-kuasai-sebuah-desa-dekat-mosul> diakses pada tanggal 15 April 2018.
- CNN. 2014. *Kurdish People Fast Facts*. <http://edition.cnn.com/2014/08/18/world/kurdish-people-fast-facts/index.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- CNN Indonesia. 2014. *Kobani Satukan Kurdi di Timur Tengah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141031152737-120-9127/kobani-satukan-kurdi-di-timur-tengah/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.
- Cockburn, P. 2017. *Iraq to end decades-old policy of semi-independent rule in Kurdistan, says PM*. Independent. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurdistan-iraq-prime-minister-abadi-interview-independence-haider-baghdad-kirkuk-patrick-cockburn-a8028201.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- Deddy. 2017. *Erdogan: Ada Campur Tangan Israel di Balik Referendum Kurdi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171001003949-120-245305/erdogan-ada-campur-tangan-israel-di-balik-referendum-kurdi/> diakses pada tanggal 22 Maret 2018.
- Detiknews. 2010. *Hasil Pemilu di Baghdad Dihitung Ulang*. <https://news.detik.com/berita/1341501/hasil-pemilu-di-baghdad-dihitung-ulang> diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
- DW. 2011. *Akhir 2011 Semua Tentara AS di Irak Dipulangkan*. <http://www.dw.com/id/akhir-2011-semua-tentara-as-di-irak-dipulangkan/a-15478982> diakses pada tanggal 14 April 2018.
- Firman, T. 2016. *Bangsa Tanpa Negara*. Tirto. <https://tirto.id/kurdi-bangsa-tanpa-negara-bCPl> diakses pada tanggal 27 September 2017.
- Firman, T. 2017a. *Gonjang-Ganjing Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak*. Tirto. <https://tirto.id/gonjang-ganjing-referendum-kemerdekaan-kurdistan-irak-cwZ7> diakses pada tanggal 24 Maret 2018.
- Firman, T. 2017b. *Kematian Saddam Hussein, Tumbangnya Simbol Pan-Arabisme*. Tirto. <https://tirto.id/kematian-saddam-hussein-tumbangnya-simbol-pan-arabisme-cCt7> diakses pada tanggal 6 April 2018.
- Halabcheh. 2015. *Saksi Sejarah Senjata Kimia Barat*. Iran Indonesian Radio. <http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/93071-halabcheh,-saksi-sejarah->

senjata-kimia-barat diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

- Hardoko, E. 2017. *Wilayah Otonom Kurdi Irak Akan Gelar Referendum Kemerdekaan*. KOMPAS. <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/08/11371261/wilayah.otonom.kurdi.irak.akan.gelar.referendum.kemerdekaan> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.
- Haryono, W. 2017. *Pasukan Irak Berusaha Rebut Kirkuk dari Tangan Kurdi*. Metrotvnews. <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/13/772757/pasukan-irak-berusaha-rebut-kirkuk-dari-tangan-kurdi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018.
- Haryono, W. 2018. *Pertama Sejak Referendum, PM Irak Bertemu Delegasi Kurdi*. Metrotvnews. <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/0Kv32Z9N-pertama-sejak-referendum-pm-irak-bertemu-delegasi-kurdi> diakses pada tanggal 23 Mei 2018.
- Hasan, R. A. 2017. *Warga Kurdistan Irak Gelar Referendum Bersejarah*. Liputan6. <http://global.liputan6.com/read/3107173/warga-kurdistan-irak-gelar-referendum-bersejarah> diakses pada tanggal 31 Desember 2017.
- Hendrik, R. 2017. *Iran Buka Kembali Perbatasan dengan Kurdistan Irak*. Mirajnews. <http://www.mirajnews.com/2017/10/iran-buka-kembali-perbatasan-dengan-kurdistan-irak.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
- Irawan, F. 2016. *Kejahatan perang di Irak*. <https://www.syamina.org> diakses pada tanggal 18 Desember 2017.
- Islam, P. A. 2017a. *Pasca-Referendum Kemerdekaan, Pemerintah Irak Ancam Lakukan Embargo Bandara di Kurdi*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/18/1783869/pasca-referendum-kemerdekaan-pemerintah-irak-ancam-lakukan-embargo-bandara-di-kurdi> diakses pada tanggal 27 Desember 2017.
- Islam, P. A. 2017b. *Ya Ampun! Berhasil Kuasai Daerah Perbatasan Turki, Irak Usir Pasukan Kurdi*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/10/27/18/1803879/ya-ampun-berhasil-kuasai-daerah-perbatasan-turki-irak-usir-pasukan-kurdi> diakses pada tanggal 2 Maret 2018.
- Islam, P., & Akbar, C. 2017. *Iraq Berencana Rebut Perbatasan Kurdistan, Embargo Udara Dimulai*. Hidayatullah. <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/10/01/124695/iraq-berencana-rebut-perbatasan-kurdistan-embargo-udara-dimulai.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

- Julio, E. 2017. *Akhir Referendum, Kurdistan “Siap” Menanggalkan Cita-Cita Kemerdekaannya*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/18/1800769/akhir-referendum-kurdistan-siap-menanggalkan-cita-cita-kemerdekaannya> diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- KBRI. 2017. *Republik Irak*. <https://www.kemlu.go.id/baghdad/id/Pages/Republik-Irak.aspx> diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- KIBLAT. 2014. *Ini Sejarah Kurdi Sejak Era Khalifah Rasyidah sampai Revolusi Suriah*. <https://www.kiblat.net/2014/10/30/ini-sejarah-kurdi-sejak-era-khalifah-rasyidah-sampai-revolusi-suriah/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
- Kiram, I. 2017. *Bangsa Tanpa Negara itu Ingin Merdeka*. Republika. <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/09/25/ows14m318-bangsa-tanpa-negara-itu-ingin-merdeka> diakses pada tanggal 27 September 2017.
- KOMPAS. 2011. *PM Maliki Perintahkan Penangkapan Wapres*. <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/03125527/pm.maliki.perintahkan.penangkapan.wapres>. diakses pada tanggal 27 Maret 2018.
- KOMPAS. 2014. *Pemimpin Kurdi Ingin Gelar Referendum Kemerdekaan dari Irak*. <https://internasional.kompas.com/read/2014/07/03/2058166/Pemimpin.Kurdi.Ingin.Gelar.Referendum.Kemerdekaan.dari.Irak>. diakses pada tanggal 27 Maret 2018.
- Kurdistan Region Presidency. 2107. *President Barzani Meets with Kurdistan Region’s Political Parties to Set the Date for the Referendum*. <http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=E8ZKw7evZVQ=> diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
- Kumparan. 2017. *Kurdi Gelar Referendum Kemerdekaan, Bikin Ketar-ketir Iran dan Turki*. <https://kumparan.com/denny-armandhanu/kurdi-gelar-referendum-kemerdekaan-bikin-ketar-ketir-iran-dan-turki> diakses pada tanggal 23 November 2017.
- Kurdistan Regional Government (KRG). 2012. *Kurdistan Parliament approves new KRG Cabinet; New Prime Minister calls for united front in Baghdad negotiations*. <http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=43519&r=&area=60&s=02010000&l=12&s=010000> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.
- Kurdistan Regional Government (KRG). 2017a. *Contemporary History*. <http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=306&p=216> diakses

pada tanggal 18 April 2018.

Kurdistan Regional Government (KRG). 2017b. *Kurdistan's geography and climate*. <http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=303&p=213> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

Kurdistan Regional Government (KRG). 2017c. *Religious Freedom and Tolerance*. <http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=310&p=220> diakses pada tanggal 17 November 2017.

Kurdistan Regional Government (KRG). 2017d. *The Kurdistan Parliament*. <http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&p=229> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

Liputan6. 2017. *Usai Referendum, 3 Negara Ini Isolasi Kurdistan Irak*. <https://www.liputan6.com/global/read/3114048/usai-referendum-3-negara-ini-isolasi-kurdistan-irak> diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

Maulana, V. 2017a. *Kurdi Irak Tolak Permintaan Liga Arab untuk Batalkan Referendum*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1238322/43/kurdi-irak-tolak-permintaan-liga-arab-untuk-batalkan-referendum-1505050652> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Maulana, V. 2017b. *Militer Irak Bersiap Rebut Wilayah Perbatasan Kurdi*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1244316/43/militer-irak-bersiap-rebut-wilayah-perbatasan-kurdi-1506767174> diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

Maulana, V. 2017c. *Pasca Referendum, Kurdi Irak Bersiap Gelar Pemilu*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1245057/43/pasca-referendum-kurdi-irak-bersiap-gelar-pemilu-1507027072> diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

Misrawi, Z. 2017. *Kurdistan dan Peta Baru Timur-Tengah*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/3671180/kurdistan-dan-peta-baru-timur-tengah> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

Monalisa. 2017. *Suku Kurdi Irak Lakukan Referendum Kemerdekaan*. Antaranews. [http://www.antaranews.com/berita/654639/suku-kurdi-irak-lakukan-referendum-kemerdekaan?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaranews.com/berita/654639/suku-kurdi-irak-lakukan-referendum-kemerdekaan?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Muhaimin. 2016. *10 Tahun setelah Saddam Digantung: ISIS, Konflik Sektarian dan Kekacauan*. Sindonews.

<https://international.sindonews.com/read/1167141/43/10-tahun-setelah-saddam-digantung-isis-konflik-sektarian-dan-kekacauan-1483121577> diakses pada tanggal 17 Maret 2018.

Muhaimin. 2017a. *Kurdi Ancang-Ancang Merdeka dari Irak Tahun Ini*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1193858/43/kurdi-ancang-ancang-merdeka-dari-irak-tahun-ini-1491211796> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Muhaimin. 2017b. *Referendum Kemerdekaan Kurdi Irak Dimulai di Tengah Ketegangan*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1242683/43/referendum-kemerdekaan-kurdi-irak-dimulai-di-tengah-ketegangan-1506321661/11> diakses pada tanggal 21 November 2017.

Nursalikah, A. 2016. *Sejarah Hari Ini: Militer Gulingkan Monarki Irak*. Republika. <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/selarung-waktu/16/07/14/0aa056366-sejarah-hari-ini-militer-gulingkan-monarki-irak> diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

Okezone. 2017. *Liga Arab: Masih Mungkin Membendung Dampak Referendum Kurdi, Asalkan*. <https://news.okezone.com/read/2017/09/27/18/1783949/liga-arab-masih-mungkin-membendung-dampak-referendum-kurdi-asalkan> diakses pada tanggal 21 November 2017.

Pars Today. 2016a. *Al Abadi: Koalisi AS Terkejut dengan Kekuatan Militer Irak*. [http://parstoday.com/id/news/middle\\_east-i24109-al\\_abadi\\_koalisi\\_as\\_terkejut\\_dengan\\_kekuatan\\_militer\\_irak](http://parstoday.com/id/news/middle_east-i24109-al_abadi_koalisi_as_terkejut_dengan_kekuatan_militer_irak) diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Pars Today. 2016b. *Tantangan Politik Irak dalam Pemberantasan Daesh*. [http://parstoday.com/id/radio/middle\\_east-i12670-tantangan\\_politik\\_irak\\_dalam\\_pemberantasan\\_daesh](http://parstoday.com/id/radio/middle_east-i12670-tantangan_politik_irak_dalam_pemberantasan_daesh) diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Perdana, A. V. 2017. *AS Tarik 400 Tentara Marinir dari Operasi Anti-ISIS di Suriah*. KOMPAS. <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/30/23122001/as-tarik-400-tentara-marinir-dari-operasi-anti-isis-di-suriah> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Perdana, A. V. 2018. *Pemerintah Irak Cabut Blokade Udara Terhadap Wilayah Kurdistan*. KOMPAS. <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/13/23014331/pemerintah-irak-cabut-blokade-udara-terhadap-wilayah-kurdistan> diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

- Prasaja, L. 2011. *Lingkaran Setan Konflik Sektarian di Iraq*. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/lilikprasaja/lingkaran-setan-konflik-sektarian-di-iraq\\_550b0845a33311b2142e392e](https://www.kompasiana.com/lilikprasaja/lingkaran-setan-konflik-sektarian-di-iraq_550b0845a33311b2142e392e) diakses pada tanggal 21 Maret 2018.
- Raharjo, B. 2017. *Irak Genjot Produksi Minyak di Kirkuk*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/11/14/ozevuc415-irak-genjot-produksi-minyak-di-kirkuk> diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Rahman, A. 2017. *Pemerintah Kurdi Irak Tetapkan Tanggal Referendum Kemerdekaan*. Metrotvnews. <http://internasional.metrotvnews.com/read/2017/06/08/712541/pemerintah-kurdi-irak-tetapkan-tanggal-referendum-kemer> diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
- Rahman, M. A. 2010. *Pentas Politik pada Pemilu Irak 2010*. KOMPAS. <https://sains.kompas.com/read/2010/03/06/03331996/Pentas.Politik.pada.Pemilu.Irak.2010> diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
- Rasheed, A., & Jalabi, R. 2017. *Iraqi Court Rules Kurdish Independence Vote Unconstitutional*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqi-court-rules-kurdish-independence-vote-unconstitutional-idUSKBN1DK0Q6> diakses pada tanggal 23 November 2017.
- Reuters. 2015. *Pemerintah Kurdi Irak Bantah Menyelundupkan Minyak ISIS*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202085959-120-95373/pemerintah-kurdi-irak-bantah-menyelundupkan-minyak-isis> diakses pada tanggal 31 Maret 2018.
- Reuters. 2017. *Respons Referendum, Pasukan Irak Rebut Kirkuk dari Kurdistan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171017083730-120-248917/respons-referendum-pasukan-irak-rebut-kirkuk-dari-kurdistan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018.
- Rudaw. 2017a. *Iraqi PM rejects Erbil's offer to freeze referendum results*. <http://www.rudaw.net/english/kurdistan/26102017> diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- Rudaw. 2017b. *Kurdistan's tourism suffering under Baghdad's referendum measures*. Rudaw. <http://www.rudaw.net/english/business/02112017> diakses pada tanggal 31 Juli 2018.
- Rudaw. 2017c. *PM Barzani: We agreed to Iraqi army territorial demands, but within limits*. <http://www.rudaw.net/english/kurdistan/211120175> diakses pada tanggal 23 November 2017.

- Rudaw. 2017d. *UN says referendum issue is resolved, urges KRG to accept court ruling*. <http://www.rudaw.net/english/kurdistan/211120177> diakses pada tanggal 23 November 2017.
- Rudaw. 2018. *PM Barzani: This was not the Iraq we wanted after 2003*. <http://www.rudaw.net/english/kurdistan/040320183> diakses pada tanggal 9 Agustus 2018.
- Samosir, H. A. 2017a. *Irak Ogah Dialog dengan Kurdistan Soal Referendum Kemerdekaan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170926103133-120-244070/irak-ogah-dialog-dengan-kurdistan-soal-referendum-kemerdekaan/> diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
- Samosir, H. A. 2017b. *Irak Rebut Kirkuk, 100 Ribu Kurdi Kabur Hindari Persekusi*. CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171020105651-120-249708/irak-rebut-kirkuk-100-ribu-kurdi-kabur-hindari-persekusi/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.
- Sindonews. 2017. *Walah! Referendum Kemerdekaan Kurdi Irak Dimulai di Tengah Ketegangan*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/09/25/18/1782506/walah-referendum-kemerdekaan-kurdi-irak-dimulai-di-tengah-ketegangan> diakses pada tanggal 2 Juni 2018.
- Sofwan, R. 2017. *Situasi Tegang, Kurdistan Irak Gelar Referendum Kemerdekaan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170925142141-120-243878/situasi-tegang-kurdistan-irak-gelar-referendum-kemerdekaan> diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
- TEMPO. 2010. *Perintahkan Pembunuhan Suku Kurdi, Sepupu Saddam Hussein Dihukum Mati*. <https://dunia.tempo.co/read/219729/perintahkan-pembunuhan-suku-kurdi-sepupu-saddam-hussein-dihukum-mati> diakses pada tanggal 21 Maret 2018.
- Tsani, A. F. 2017. *Analisis: Israel Ambil Manfaat Kemerdekaan Kurdi*. Mirajnews. <http://www.mirajnews.com/2017/09/analisis-israel-ambil-manfaat-kemerdekaan-kurdi.html> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.
- Ventura, B. 2017. *Konflik Irak-Kurdi Lambungkan Harga Minyak*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/read/1250460/35/konflik-irak-kurdi-lambungkan-harga-minyak-1508576026> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.
- VOA Indonesia. 2012. *Kurdi Irak Hentikan Ekspor Minyak*.



[https://www.voaindonesia.com/a/kurdi\\_irak\\_hentikan\\_ekspor\\_minyak/110974.html](https://www.voaindonesia.com/a/kurdi_irak_hentikan_ekspor_minyak/110974.html) diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

VOA Indonesia. 2014. *Wakil Ketua DPR Irak Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Baru*. <https://www.voaindonesia.com/a/wakil-dpr-irak-ditunjuk-bentuk-pemerintahan/2409855.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

VOA Indonesia. 2017a. *Mahkamah Agung Irak Batalkan Referendum Kemerdekaan Kurdi*. <https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-agung-irak-batalkan-referendum-kemerdekaan-kurdi/4126338.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2018.

VOA Indonesia. 2017b. *Parlemen Irak Kecam Rencana Referendum bagi Kemerdekaan Kurdi*. <https://www.voaindonesia.com/a/parlemen-irak-kecam-referendum-kemerdekaan-kurdi-/4026475.html> diakses pada tanggal 31 Mei 2018.

VOA Indonesia. 2017c. *Situasi Tegang di Kirkuk Saat Pasukan Kurdi dan Irak Saling Berhadapan*. <https://www.voaindonesia.com/a/situasi-tegang-di-kirkuk-saat-pasukan-kurdi-irak-saling-berhadapan-/4070179.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

VOA Indonesia. 2017d. *Wapres Irak: Perang Saudara Dapat Terjadi Atas Kota Kirkuk*. <https://www.voaindonesia.com/a/wapres-irak-perang-saudara-dapat-terjadi-atas-kota-kirkuk/4062615.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

Wadrianto, G. K. 2017. *Penerbangan Internasional di Ibu Kota Kurdi-Irak Dihentikan, Ada Apa?*. KOMPAS. <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/28/16014221/penerbangan-internasional-di-ibu-kota-kurdi-irak-dihentikan-ada-apa> diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

Wibisono, B. K. 2017. *Turki Berikrar Ambil Tindakan Jika Referendum Kurdistan Irak Bahayakan Keamanannya*. Antaranews. [http://www.antaranews.com/berita/654655/turki-berikrar-ambil-tindakan-jika-referendum-kurdistan-irak-bahayakan-keamanannya?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaranews.com/berita/654655/turki-berikrar-ambil-tindakan-jika-referendum-kurdistan-irak-bahayakan-keamanannya?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Zeed, A. A. 2017. *Baghdad looks to take control of KRG oil*. Al-Monitor. <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/11/kirkuk-baghdad-kurdistan-somo-ceyhan.html> diakses pada tanggal 15 November 2017.

Zhdannikov, D. 2015. *Exclusive: How Kurdistan bypassed Baghdad and sold oil on global markets*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil/exclusive-how-kurdistan-bypassed-baghdad-and-sold-oil-on->

global-markets-idUSKCN0T61HH20151117 diakses pada tanggal 31 Maret 2018.

